

**LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN**

**KAJIAN ANALISA PARTISIPASI POLITIK  
MASYARAKAT JAWA BARAT TAHUN 2022**

**Ketua Peneliti:**

Leo Agustino, PhD

**Anggota Peneliti:**

Firman Manan, MA.  
Idil Akbar, MIP.

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA BARAT  
(Kesbangpol Jabar)**

**2022**



**LAPORAN PENELITIAN**

**KAJIAN ANALISA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT JAWA  
BARAT TAHUN 2022**

**Ketua Peneliti:**

Leo Agustino, PhD

**Anggota Peneliti:**

Firman Manan, MA.

Idil Akbar, MIP.

Indra Permana, S.IP. (*Research Assistance*)

Tedy Nurzaman, S.E. (*Research Assistance*)

Biaya Penelitian : Rp. 100.000.000

Dibiyai oleh : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Provinsi Jawa Barat  
(Kesbangpol Jabar)

## **PRAKATA**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada khadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan terkait Kajian Analisa Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan tanpa adanya hambatan yang berarti. Bukan hanya karena hal tersebut, rasa syukur terhadap terhadap hasil yang ditemukan dalam Analisa Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Barat Tahun 2022 di dalam Laporan ini.

Apa yang disajikan didalam laporan ini merupakan hasil dari Analisa terkait dengan partisipasi politik masyarakat di Jawa Barat Tahun 2022 yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi politik masyarakat Jawa Barat serta menunjukkan indikator-indikator apa saja yang dapat menyebabkan tinggi atau rendahnya partisipasi politik tersebut, terlebih dalam menyongsong tahun politik di tahun 2024. Survei ini dilaksanakan di Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dengan menggunakan *mix-methods* metode pengumpulan data indeks digunakan teknik survei deskriptif, yang pengumpulan datanya melalui kuesioner mengenai tingkat partisipasi politik di suatu wilayah. Hasil dari survei yang disampaikan dalam laporan ini semoga berguna dan memacu semua pihak untuk bekerja lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan partisipasi politik yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang baik ini juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu kami dalam menyelesaikan laporan ini. Dengan ini pula kami memohon maaf atas kesalahan serta kekurangan dalam pekerjaan kami. Kami berharap apa yang kerjakan dan hasil yang disajikan menjadi sumbangsih demi terwujudnya Jawa Barat sebagai provinsi dengan partisipasi politik yang tinggi menyongsong tahun politik di tahun 2024.

Bandung, Desember 2022

**Leo Agustino, PhD**

Ketua Tim

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR & GRAFIK .....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	3
1.3 Target dan Sasaran .....	4
1.5 Ruang Lingkup/Batasan Kegiatan .....	4
1.6 Keluaran/ <i>Output</i> .....	5
1.7 Waktu Dan Pelaksanaan Kegiatan .....	5
1.8 Dasar Hukum .....	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Tinjauan Tentang Partisipasi Politik .....	7
2.1.1 Pengertian dan Konsep Partisipasi Politik .....	7
2.2 Tinjauan Tentang <i>Social Economic Status</i> .....	10
2.2.1 Pengertian dan Konsep <i>Social Economic Status</i> .....	10
2.2.2 Indikator Sosial Ekonomi .....	12
BAB 3 METODE PENELITIAN .....	15
3.1 Desain Penelitian .....	15
3.2 Tahapan Penyusunan Data Dasar ( <i>Insight Finding</i> ) .....	16
3.3 Pengumpulan Data Pra dan Eksisting .....	16
3.4 Kategorisasi dan Analisis Data .....	18
3.5 Validitas Data .....	20
3.6 Formulasi Strategi dan Rekomendasi .....	20
3.7 Skema Penelitian dan Jangka Waktu Pelaksanaan .....	21

<b>BAB 4 GAMBARAN UMUM PARTISIPASI POLITIK PROVINSI JAWA BARAT</b>	<b>23</b>
<b>4.1 Gambaran Umum Jawa Barat</b> .....	<b>23</b>
<b>4.2 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Barat (2018-2020)</b> .....	<b>24</b>
<b>4.2 Sosial Ekonomi Status Masyarakat Jawa Barat</b> .....	<b>30</b>
<b>4.2.1 Indeks Pembangunan Manusia</b> .....	<b>30</b>
<b>4.2.2 Pendidikan</b> .....	<b>33</b>
<b>BAB 5 PEMBAHASAN DAN ANALISIS</b> .....	<b>37</b>
<b>5.1 Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Barat</b> .....	<b>37</b>
<b>5.2. Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Barat Wilayah Urban</b> .....	<b>39</b>
<b>5.2.1 Analisis Partisipasi Politik Jawa Barat Kategori Urban</b> .....	<b>41</b>
<b>5.3. Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Barat Wilayah Sub-Urban</b> .....	<b>42</b>
<b>5.3.1 Analisis Partisipasi Politik Jawa Barat Kategori Sub-Urban</b> .....	<b>45</b>
<b>5.4. Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Barat Wilayah Rural</b> .....	<b>46</b>
<b>5.4.1 Analisis Partisipasi Politik Jawa Barat Kategori Rural/Pedesaan</b> .....	<b>49</b>
<b>BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	<b>51</b>
<b>6.1 Kesimpulan</b> .....	<b>51</b>
<b>6.2 Rekomendasi</b> .....	<b>52</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>54</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Jangka Waktu dan Tahap Pelaksanaan .....	22
Tabel 4. 1 Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat .....	23
Tabel 4. 2 Tabel Partisipasi Pemilih Pilkada Jawa Barat Tahun 2020	
Tabel 4. 3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat .....	31
Tabel 4. 4 Indeks Pendidikan Jawa Barat 2019 – 2021 .....	34

## DAFTAR GAMBAR & GRAFIK

Gambar 3. 1 Skema Penelitian.....	21
Gambar 4. 1 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 .....	24
Gambar 4. 2 Jumlah Pemilih Pilpres 2019 di Jawa Barat.....	25
Gambar 4. 3 Perolehan Suara Pilgub Jawa Barat 2018 .....	29
Gambar 4. 4 Sebaran Suara Pilgub Jawa Barat 2018 .....	30
Gambar 4. 5 Sebaran IPM tertinggi-Terendah di Jawa Barat.....	32
Gambar 4. 6 Sebaran Status IPM di Jawa Barat .....	32
Grafik 4. 1 Suara Legislatif DPR RI di Jawa Barat Tahun 2019 .....	26
Grafik 4. 2 Suara Legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.....	26
Grafik 4. 3 Suara Legislatif DPRD Kab/Kota Jawa Barat Tahun 2019 .....	27
Grafik 4. 4 Sebaran APK/APM di Jawa Barat.....	35
Grafik 4. 5 Selisih APK/APM di Jawa Barat.....	36
Grafik 5. 1 Jumlah Organisasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017-2022 .....	38
Grafik 5. 2 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilgub Jabar 2018 .....	39
Grafik 5. 3 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilu 2019 .....	40
Grafik 5. 4 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilkada 2020 Urban.....	41
Grafik 5.5 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilgub 2018 Sub-Urban.....	43
Grafik 5.6 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilu 2019 Sub-urban.....	44
Grafik 5.7 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilkada 2020 Sub-Urban.....	45
Grafik 5.8 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilgub 2018 Rural.....	47
Grafik 5.9 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilu 2019 Rural.....	48



Grafik 5.10 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilkada 2020 Rural.....49

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan konsep demokrasi prosedural dan juga merupakan salah satu cara terkuat bagi rakyat untuk menerapkan demokrasi modern (Samosir & Mali, 2021). Indonesia sebagai negara demokrasi harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara rutin dan berkesinambungan, di mana pemilihan kepala daerah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pilkada) dalam Pasal 24 ayat (5) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan di daerah yang bersangkutan. Pemilihan langsung telah dilaksanakan sejak tahun 2005 sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih melalui sistem demokrasi.

Selanjutnya pemilu akan berlangsung secara bersamaan pada tahun 2024, namun ada beberapa dampak yang akan terjadi jika Pilkada dilaksanakan pada tahun 2024, yaitu Pertama, bersamaan dengan Pemilu Nasional yang akan semakin menambah beban kerja penyelenggara pemilu. Jika pemilu besar digabung menjadi satu dalam kurun waktu 9 bulan di tahun yang sama, akan menyulitkan penyelenggara pemilu dan berpotensi membuat penyelenggara pemilu tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dan tentunya akan berdampak pada kualitas pemilu. Kedua, dampak masyarakat akan bingung memilih karena pilihannya banyak dan nantinya Pilkada akan kehilangan perhatian publik, karena masyarakat lebih tertarik memilih Presiden dan membahas Pilkada.

Adapun penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan di akar rumput, yakni kesiapan keterlibatan masyarakat pada pemilu serentak di tahun 2024 nanti berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Di dalam kedua undang-undang tersebut diamanatkan bahwa tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilu secara serentak dalam satu tahun yaitu pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan tingkat partisipasi masyarakat atau pemilih di Jawa Barat pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 mencapai 75 persen atau meningkat dibandingkan dengan Pemilu 2014. Pada Pilpres 2014 angka partisipasi ada di angka 70 persen. Tapi pada Pemilu 2019 partisipasi masyarakat di atas 75 persen. Artinya partisipasi masyarakat sudah sangat tinggi, Gubernur mengatakan peningkatan partisipasi pemilih ini kemungkinan disebabkan pilpres dibarengi dengan pileg sehingga banyak calon legislatif yang rajin berpromosi, sosialisasi, serta menarik masyarakat agar turut di pesta demokrasi ini (Jabar Antaranews, 2019). Sedangkan pada pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2018 partisipasi masyarakat Jawa Barat dalam menyalurkan hak pilihnya di Pilkada Serentak 2018 meningkat dari 63 persen menjadi 73 persen. Yang menjadi tantangan pada tahun 2024 dan perlu untuk dijawab adalah ketika nanti kedua pemilihan yang sebelumnya dilakukan secara terpisah akankah menyebabkan perbedaan terhadap tingkat partisipasi masyarakat Jawa Barat?

Merujuk hasil survei charta politica maret 2022 bahwa masyarakat jawa barat mendukung pelaksanaan pemilu tahun 2024 sebesar 65,3%, tentunya angka tersebut perlu diurakian dalam kajian yang lebih lanjut, apakah dukungan untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 akan berjalan lurus dengan masyarakat akan berpartisipasi pada pemilu 2024 nanti? Partisipasi politik tentunya menjadi satu hal penting dalam proses demokrasi. Jawa

Barat sebagai salah satu provinsi terbesar dan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia menjadi bagian penting dari proses demokrasi itu sendiri, partisipasi politik di Jawa barat menjadi satu bagian penting kontrol dan juga legitimasi masyarakat terhadap pemerintahan sehingga menjadi penting bagaimana menganalisis dan melihat secara mendalam partisipasi politik di Jawa Barat, perbaikan permasalahan dan kendala yang terjadi dalam kegiatan partisipasi politik masyarakat di Jawa Barat tentunya harus dilihat secara mendalam dan dianalisis sehingga tercipta satu formula perbaikan dalam memenuhi hak – hak warga negara dalam partisipasi politik di Jawa Barat.

Bertolak dari gagasan tersebut, menganalisis partisipasi politik menjadi bagian yang tak terpisahkan dan penting dalam proses demokrasi yang terjadi di Jawa Barat sehingga analisis ini diperlukan untuk melihat permasalahan dan kendala yang terjadi dalam kegiatan partisipasi politik itu sendiri, terciptanya satu formulasi perbaikan dan solusi yang hadir dari setiap permasalahan dan kendala diperlukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terbesar dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai sarana menampung dan mencari informasi terkait permasalahan dan kendala partisipasi politik masyarakat di Jawa Barat. Sehingga dapat diformulasikan satu solusi kebijakan yang mampu mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat Jawa Barat dalam proses demokrasi tahun 2024.

Tujuan dari kegiatan ini adalah terciptanya satu kajian analisis mendalam yang mampu memotret permasalahan dan kendala partisipasi politik di Jawa barat dan juga

formula dari solusi permasalahan dan kendala yang terjadi dalam kegiatan partisipasi politik masyarakat di Jawa Barat

### **1.3 Target dan Sasaran**

Sesuai dengan maksud tujuan di atas, Maka target dan sasaran yang diharapkan adalah:

- a) Data dan informasi yang berkaitan dengan tingkat partisipasi politik masyarakat Jawa Barat dan permasalahan juga kendala partisipasi politik masyarakat Jawa Barat.
- b) Kajian Analisis yang berkaitan dengan tingkat partisipasi politik, Pemasalahan, Kendala, dan solusi partisipasi politik masyarakat Jawa Barat.

### **1.5 Ruang Lingkup/Batasan Kegiatan**

Lingkup pekerjaan kajian Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Di Jawa Barat terdiri dari:

#### **I. Kegiatan Teknis:**

1. Pengumpulan data. Pengumpulan data primer dan sekunder yang dilakukan dengan metode: observasi, studi literatur, studi dokumen, *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara mendalam.
2. Analisis data. Analisis terhadap permasalahan dan data yang dihasilkan dalam proses pengambilan data.
3. Penyusunan Laporan/Penyusunan Kajian.

#### **II. Kegiatan Ekspos dan Diskusi:**

Kegiatan ekspos dan diskusi dilakukan untuk membahas perkembangan tahapan pekerjaan yang dilakukan dalam dua tahap: penyusunan laporan pendahuluan dan penyusunan laporan akhir.

## **1.6 Keluaran/Output**

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Dokumen Keluaran yang berisi Laporan Kajian analisis partisipasi politik masyarakat Jawa Barat

## **1.7 Waktu Dan Pelaksanaan Kegiatan**

Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dalam waktu 1 bulan/30 hari (tiga puluh) hari kalender, sejak dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja dari PPK.

## **1.8 Dasar Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- 6) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Tentang Partisipasi Politik**

##### **2.1.1 Pengertian dan Konsep Partisipasi Politik**

Kata partisipasi identik dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam kehidupan berpolitik. Partisipasi sendiri memiliki makna yang berarti ikut serta, terlibat, berkontribusi, adanya peran dan kerja sama. Selain itu, berpartisipasi diartikan sebagai pihak yang mengikuti, berperan, dan terjun.

Endarmoko (2006) Demokrasi pun memiliki beberapa aspek penting dan salah satunya adalah partisipasi. Demokrasi dan partisipasi yang didasari oleh asumsi pihak yang merasa tahu tentang apa yang terbaik bagi dirinya sendiri. (Berger, 1976). Kehidupan masyarakat sangat berpengaruh dan bergantung pada keputusan dan regulasi yang dirancang oleh pemerintah, dengan ini masyarakat memiliki hak untuk menentukan bagaimana hak kehidupan mereka dengan pendapat dan berpandangan secara politik,

Konsep partisipasi politik dalam ilmu politik terkadang menjadi problematika penting khususnya dalam pendekatan perilaku atau perilaku behavioral dan pasca tingkah laku atau post-behaviorial, Negara-negara berkembang kerap melakukan berbagai kajian-kajian politik karena negara berkembang masih dalam tahap perkembangan. (Ramlan Surbakti, 1992). Teori-teori seperti teori modernisasi yang terdapat didalam literatur yang membahas mengenai partisipasi politik mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan bidang kajian pembangunan politik yang kerap dilakukan oleh para ahli ilmu politik seperti Gabriel A. Almond, Coleman, Lucyan W. Pye, dan Samuel P. Huntington.

Partisipasi politik memiliki definisi dan konsep dari berbagai pandangan seperti dari Samuel Huntington yang mengatakan partisipasi politik adalah tindakan preman (private citizen) yang merupakan salah satu dari warga negara yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah (Huntington & Nelson, 1994). Selain itu, dari McClosky (1972), menyatakan bahwa kegiatan sukarela dari warga negara dan darimana mereka melakuai pengambilan bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung dan tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan publik merupakan cakupan dari partisipasi politik. Kemudian menurut Nie & Verba (1975) mereka memiliki artian khusus mengenai partisi politik, keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi keputusan pemerintah merupakan definisi dari partisi politik. Partisi politik bagi mereka merupakan agenda privat warga negara yang legal dan sedikit sampai banyak dengan tujuan secara langsung mempengaruhi dalam seleksi pejabat negara maupun tindakan-tindakan yang diambil oleh para aparatur sipil negara. Dalam pembahasan yang utama adalah tujuan dngan segala tindakan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah yang terkadang fokus namun sebenarnya lebih mendalam tetapi abstrak seperti usaha-usaha untuk mempengaruhi dengan cara otoritatif tentang alokasi nilai untuk masyarakat.

Dengan berbagai definisi konseptual yang diuraikan pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi mempunyai makna dan definisi yaitu keterlibatan yang dilakukan secara sukarela dan dilakukan secara nyata tanpa ada paksaan dan tekanan. Kegiatan ini kerap dilakukan oleh masyarakat biasa, dengan kebiasaan ini seolah-olah menutup kemungkinan jika bukan warga negara biasa tidak dapat melakukan kegiatan tersebut. Pemerintah sebagai pemegang otoritas merupakan institusi yang



menjadi objek politik dalam partisipasi politik. Partisipasi politik juga memiliki tujuan utama yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas pemerintahan. Anggota masyarakat yang terlibat dalam proses politik dimotivasi oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan tersebut kebutuhan dan kepentingan mereka akan tersalurkan atau paling tidak terfasilitasi. Dan mereka dapat memiliki sedikit banyak pengaruh pada bagaimana pemerintah membuat keputusan yang mengikat. Dengan maksud lain, mereka percaya bahwa hal ini akan mempunyai dampak, dan ini dinamakan *political efficacy*.

Dari uraian di atas, Perlu dibedakan kegiatan mana yang merupakan bentuk partisipasi politik dan mana yang bukan. Huntington dan Nelson (1994) berusaha untuk memberlakukan pembatasan partisipasi politik, misalnya, pertama-tama memasukkan kegiatan aksi politik yang sebenarnya; kedua, melibatkan kegiatan politik warga negara; ketiga, fokus hanya pada kegiatan yang bertujuan mempengaruhi keputusan Pemerintah saja. Keempat, mencakup semua kegiatan yang bertujuan membujuk pemerintah. Kelima, tidak hanya mencakup kegiatan yang dimaksudkan oleh pelaku untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, yang dikenal sebagai partisipasi bebas. Tetapi juga mencakup kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah atau partisipasi mobilisasi.

Lebih jelasnya dapat dilihat pada Model Partisipasi Politik yang dijelaskan oleh Huntington & Nelson (1944) antara lain:

1. Kegiatan Pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.

2. Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. Contacting, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
5. Tindakan Kekerasan (violence) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

## **2.2 Tinjauan Tentang *Social Economic Status***

### **2.2.1 Pengertian dan Konsep *Social Economic Status***

Pembahasan tentang pengertian ekonomi dan sosial lebih sering dibahas secara terpisah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, sosial berarti sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. (KBBI, 1996). Sedangkan dalam konsep sosiologi, Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial. Ini berarti bahwa orang tidak dapat hidup normal tanpa bantuan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, kata masyarakat sering diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat. Pengertian sosial dalam ilmu-ilmu sosial mengacu pada objek, yaitu masyarakat. Sektor sosial menawarkan kegiatan yang menunjukkan pemecahan masalah yang dihadapi masyarakat dalam hal kesejahteraan: batas-batas fungsional dan kesejahteraan sosial.

Ekonomi dalam bahasa Inggris adalah “economy”. Namun, economy itu sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu “oikos” yang berarti keluarga atau rumah tangga dan “nomos” yaitu peraturan, aturan, hukum (Damsar dan Indrayani 2013). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu ekonomi mengacu pada ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip produksi, distribusi, dan penggunaan barang dan kekayaan (seperti keuangan, industri, dan perdagangan). (KBBI, 1996).

Santrock (2007) Status sosial ekonomi adalah sekelompok orang berdasarkan kesamaan karakteristik pekerjaan. studi ekonomi. Status sosial ekonomi menunjukkan beberapa ketimpangan umumnya yang dimiliki anggota seperti :

1. Pekerjaan yang bervariasi prestisenya, dan beberapa individu memiliki akses yang lebih besar terhadap pekerjaan berstatus lebih tinggi dibanding orang lain;
2. Tingkat pendidikan yang berbeda, ada beberapa individual memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan yang lebih baik dibanding orang lain;
3. Sumber daya ekonomi yang berbeda;
4. Tingkat kekuasaan untuk mempengaruhi institusi masyarakat. Perbedaan dalam kemampuan mengontrol sumber daya dan berpartisipasi dalam ganjaran masyarakat menghasilkan kesempatan yang tidak setara.

Sosial ekonomi menurut Abdulsyani (1994) adalah kedudukan seseorang dalam suatu kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis kegiatan ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis tempat tinggal dan kedudukan dalam organisasi, sedangkan menurut Soekanto (2001) Status sosial ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat relatif terhadap orang lain ditinjau dari lingkungan yang bersangkutan. keberhasilannya serta hak dan kewajibannya berkenaan dengan sumbernya. Dari beberapa definisi di atas Secara ringkas, sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan suatu masyarakat. Pikirkan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan ini berkaitan dengan pendapatan. Hal ini harus disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bidang sosial dan bidang ekonomi sangatlah berkaitan. Marx mengungkapkan bahwa Kontribusi utamanya pada teori sosial adalah pandangan bahwa ekonomi menentukan masyarakat yang paling berpengaruh. (Beilharz, 2003). Tindakan ekonomi dapat dilihat dalam tindakan sosial selama tindakan tersebut memperhatikan perilaku orang lain. (Weber dalam Damsar, 1997). Menurut Swedberg dan Grandovetter, terdapat 3 proposisi utama antara kaitan ekonomi dengan masyarakat, yaitu:

1. Tindakan ekonomi adalah suatu bentuk dari tindakan sosial.
2. Tindakan ekonomi disituasikan secara sosial.
3. Institusi-institusi ekonomi dikonstruksi secara sosial.

Melly G. Tan mengatakan untuk Jika dilihat dari kondisi sosial ekonomi suatu keluarga atau masyarakat, maka ada tiga aspek yaitu pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan, maka dari itu keluarga atau masyarakat dapat diklasifikasikan memiliki status sosial ekonomi rendah, menengah, dan tinggi. (Tan dalam Koentjaraningrat, 1981).

### **2.2.2 Indikator Sosial Ekonomi**

Keluarga atau kelompok masyarakat dapat digolongkan sebagai masyarakat dengan status sosial ekonomi rendah, sedang, atau tinggi. (Koentjaraningrat, 1981). Berdasarkan hal tersebut kita dapat mengklarifikasikan keadaan sosial ekonominya, yang dapat dijabarkan sesuai dengan indikator sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan mempengaruhi status sosial seseorang, terutama dalam masyarakat materialis dan tradisi yang lebih menekankan pada status ekonomi dan sosial daripada kekayaan. Pendapatan adalah aliran uang atau barang yang diterima seseorang, kelompok, perusahaan atau ekonomi dalam jangka waktu tertentu. (Wirosuharjo, 1985). Christopel dalam Sumardi mendefinisikan pendapatan berdasarkan kamus ekonomi adalah uang yang diterima oleh seseorang dalam bentuk gaji, upah sewa, bunga, laba dan lain sebagainya.

## 2. Pekerjaan

Pekerjaan menentukan status sosial ekonomi karena pekerjaan memenuhi segala kebutuhan. Pekerjaan tidak hanya bernilai ekonomis. Hal ini juga merupakan upaya manusia untuk mendapatkan kepuasan dan untuk menerima imbalan atau imbalan. Pekerjaan merupakan kegiatan manusia untuk menopang kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sesuai dengan pendapat Bintarto (1986) yang mengemukakan bahwa mata pencaharian merupakan aktivitas manusia guna mempertahankan hidupnya dan guna memperoleh taraf hidup yang lebih layak dimana corak dan ragamnya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan tata geografi daerahnya. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi kemampuan ekonominya, untuk itu bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap individu sebab dalam bekerja mengandung dua segi, kepuasan jasmani dan terpenuhinya kebutuhan hidup. Pekerjaan yang ditekuni oleh setiap orang berbeda-beda, perbedaan itu akan menyebabkan perbedaan tingkat penghasilan yang rendah sampai pada tingkat penghasilan yang tinggi, tergantung pada pekerjaan yang ditekuninya. Contoh

pekerjaan berstatus sosial ekonomi rendah adalah pekerja pabrik, buruh manual, penerima dana kesejahteraan, dan pekerja pemeliharaan (Santrock, 2007).

### 3. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya dimasa yang akan datang. Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2013 pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata “didik” dan mendapat imbuhan “pe” dan akhiran “an”, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Dengan demikian, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

### 4. Kesehatan

Pengertian kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa pengertian kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian Analisis partisipasi politik masyarakat Jawa Barat bertujuan untuk: (i) Mengidentifikasi tingkat partisipasi politik masyarakat Jawa Barat dalam rentang tahun 2018-2020, (ii) Menganalisis faktor penyebab tingkat partisipasi keterhubungannya dengan sosial ekonomi status masyarakat Jawa Barat, dan (iii) Menganalisis isu-isu politik yang berkembang pada masyarakat Jawa Barat. Karena itulah, desain penelitian menjadi sangat penting untuk menghasilkan validitas data dalam rangka menghadirkan ketersediaan data yang akurat.

Selain desain penelitian yang berkualitas, hal lain yang perlu dipertimbangan dalam Penelitian Analisis partisipasi politik masyarakat Jawa Barat haruslah berangkat dari *existing condition* (kondisi nyata) di 27 kabupaten/kota serta setiap organisasi masyarakat yang berhubungan dengan tingkat partisipasi politik yang diteliti. Maknanya, desain penelitian yang dirancang harus diperoleh berdasarkan pada kondisi objektif dan terbaru/terkini.

Kajian ini menggunakan pendekatan *mix-methods* berupa pengukuran kondisi real atau biasa disebut *conditional-term* dari berbagai fakta yang terjadi di suatu lokasi area. Kajian ini dilakukan dengan tujuan menguji teori-teori yang ada dengan menggunakan metode penelitian untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan dengan tujuan melukiskan variabel atau kondisi apa yang ada dalam suatu situasi. Pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan

instrumen pengumpulan data kejadian (*conditional term*) dan analisis datanya bersifat statistik dan deskripsi.

### **3.2 Tahapan Penyusunan Data Dasar (*Insight Finding*)**

Penyusunan data dasar Analisis partisipasi politik masyarakat Jawa Barat dilakukan dengan metode studi dokumen atau literasi, mempelajari data-data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik terkait indeks partisipasi politik masyarakat Jawa Barat sebagai guna mendapatkan data dasar.

### **3.3 Pengumpulan Data Pra dan Eksisting**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Margareth (2014) menjelaskan bahwa metode kualitatif merupakan suatu proses penelitian ilmiah untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan memberikan gambaran terperinci dari para sumber informasi serta dilakukan dalam kondisi tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti sesuai dengan perangkat metodologis yang disediakan pendekatan kualitatif (Margareth, 2014).

Pengumpulan data dilakukan sebagai tahapan untuk menguji temuan-temuan data dasar yang telah dihimpun oleh Tim Peneliti dari sumber yang telah diklasifikasi. Pengumpulan data merupakan sebuah rangkaian aktivitas interelasi antara Tim Peneliti dengan sumber data yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang muncul. Pengumpulan data dalam Analisis partisipasi politik masyarakat Jawa Barat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:



### 1) **Observasi**

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Peneliti untuk langsung turun ke lapangan guna mengamati dan memahami dinamika politik yang terjadi di lingkungan masyarakat Jawa Barat. Dalam observasi, Tim Peneliti mencatat, baik dengan cara terstruktur maupun semi-terstruktur. Pada konteks penelitian ini, Tim Peneliti cenderung menggunakan observasi non-partisipatoris.

### 2) ***In-Depth Interview***

Pengumpulan data dengan teknik *Indepth Interview* dilakukan oleh Tim Peneliti guna mendapatkan kedalaman atas informasi awal yang telah diperoleh, sehingga data yang dimiliki atas Penelitian Analisis Kinerja Pemerintahan Kota Bandung terkonfirmasi secara ilmiah dari nara sumber yang menjadi representasi setiap organisasi masyarakat yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan partisipasi politik masyarakat Jawa Barat. Sejalan dengan makna atas *In-Depth Interview*, giat pengumpulan data menjadi ilmiah karena melibatkan secara langsung pelaku utama dalam Analisis partisipasi politik masyarakat Jawa Barat.

### 3) ***Focus Group Discussion (FGD)***

*Focus Group Discussion (FGD)* adalah diskusi yang dilaksanakan secara terstruktur dengan para narasumber dengan tujuan mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait Analisis partisipasi politik masyarakat Jawa Barat. Pedoman wawancara FGD dibuat dalam format pertanyaan terbuka (*open-ended*) yang dirancang guna memunculkan pandangan dan

opini para narasumber; termasuk melakukan cross-checks atas temuan-temuan awal Tim Peneliti.

#### **4) Studi Dokumentasi**

Penelusuran dokumen sangat penting dalam penelitian kualitatif sebagai upaya untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan atau narasumber. Dokumen dalam penelitian ini ditelusuri melalui dokumen publik seperti risalah-risalah rapat, laporan terkait, berita dari koran, makalah, ataupun lainnya. Dalam konteks penelitian ini dominan dokumen yang akan dikumpulkan adalah dokumen yang bersifat formal, seperti: Laporan BPS, laporan kedinasan, makalah, petunjuk teknis lapangan, berita di media cetak dan elektronik, serta lainnya.

### **3.4 Kategorisasi dan Analisis Data**

Pengolahan data dalam Penelitian Analisis partisipasi politik masyarakat Jawa Barat dengan merujuk pada langkah-langkah berikut:

- 1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara, melakukan scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- 2) Membaca keseluruhan data. Pada tahap ini dilakukan kegiatan menulis catatan-catatan khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh.

- 3) Menganalisis lebih detail dengan melakukan coding data. Coding data merupakan proses pengolahan materi atau informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya.
- 4) Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan kebutuhan data sesuai kategori yang menjadi pokok Analisa Kinerja Pemerintahan Kota Bandung.
- 5) Penyajian dalam narasi atau laporan; termasuk di dalamnya interpretasi atau memaknai data yang diperoleh.

Dalam kajian ini, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni seperti berikut:

- 1) Kondensasi data yaitu proses pemilihan, focussing, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data “mentah” yang ada dalam catatan lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara membaca transkrip FGD, catatan observasi, atau dokumen yang akan dianalisis. Lalu membuat catatan atau memo atas data dan ringkasan.
- 2) Tampilan data atau display yaitu kumpulan informasi yang terorganisasi dalam bentuk infografis dan narasi. Di luar itu, tampilan data dalam kajian ini umumnya berupa teks, kutipan (*quotes*), matriks, dan juga tabel.
- 3) Penulisan kesimpulan adalah proses penyimpulan sejak data pertama terkumpul, tetapi Tim Peneliti “menempatkannya” sebagai temuan awal yang masih terbuka kemungkinan untuk mengalami perubahan. Tim Peneliti dalam hal ini bersikap skeptis. Kesimpulan akhir baru muncul ketika tahap pengumpulan data berakhir.

### **3.5 Validitas Data**

Konsekuensi data yang diperoleh dari berbagai sumber atau jenis data yang berbeda adalah mengenai validitasnya. Berkaitan dengan validasi tersebut perlu dilakukan triangulasi, baik itu: (i) triangulasi data, yakni penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian, seperti mewawancarai orang pada posisi status yang berbeda dengan titik pandang yang berbeda; (ii) triangulasi investigator, yakni penggunaan beberapa evaluator atau ilmuwan sosial yang berbeda; (iii) triangulasi teori, yaitu penggunaan sudut pandang ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal data; ataupun (iv) triangulasi metodologi, yang merupakan penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, seperti: wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur, dan dokumen.

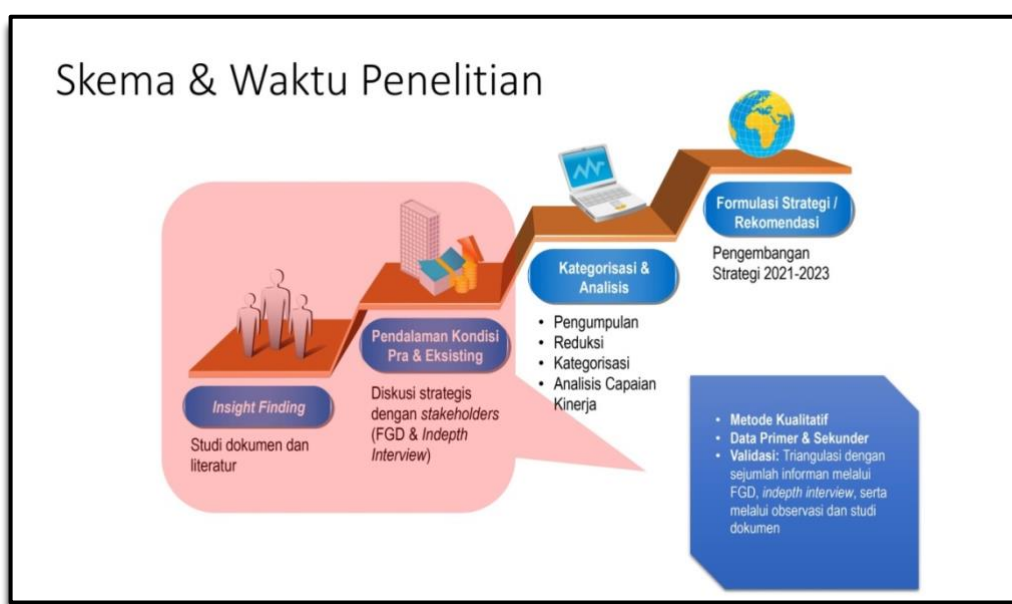
### **3.6 Formulasi Strategi dan Rekomendasi**

Hasil akhir dari Analisis partisipasi politik masyarakat Jawa Barat tentu saja selain menyajikan data atas Partisipasi Politik masyarakat Jawa Barat tahun 2018-2020 tentu saja adalah melahirkan sebuah formulasi atas strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong tingkat partisipasi politik masyarakat Jawa Barat. Formulasi berangkat dari hasil evaluasi terhadap temuan data yang menjadi hambatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong tingkat partisipasi, kemudian disajikan dalam laporan ilmiah penelitian agar menjadi sebuah rekomendasi guna mengoptimalkan Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

### 3.7 Skema Penelitian dan Jangka Waktu Pelaksanaan

Skema penelitian disusun agar setiap proses penelitian dan penghimpunan data yang dilakukan Tim Peneliti tersistematis sehingga mendapatkan hasil data yang ilmiah, juga guna memudahkan pembaca agar dapat memahami struktur hasil penelitian yang telah disusun.

**Gambar 3. 1 Skema Penelitian**



Sumber: Tim Peneliti (2021)

Jangka waktu pelaksanaan Penyusunan Data Analisis Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Bandung selama empat minggu atau satu terhitung sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3. 1 Jangka Waktu dan Tahap Pelaksanaan**

No	Skema dan Waktu Penelitian	November 2022			
		Minggu I	Minggu II	Minggu III	Minggu IV
1	<i>Insigh Finding</i>				
2	Pendalaman Kondisi Pra & Eksisting				
3	Kategorisasi dan Analisis				
4	Formulasi Strategi dan Rekomendasi				

Sumber: Tim Peneliti (2022)

## BAB 4

### GAMBARAN UMUM PARTISIPASI POLITIK

#### PROVINSI JAWA BARAT

#### 4.1 Gambaran Umum Jawa Barat

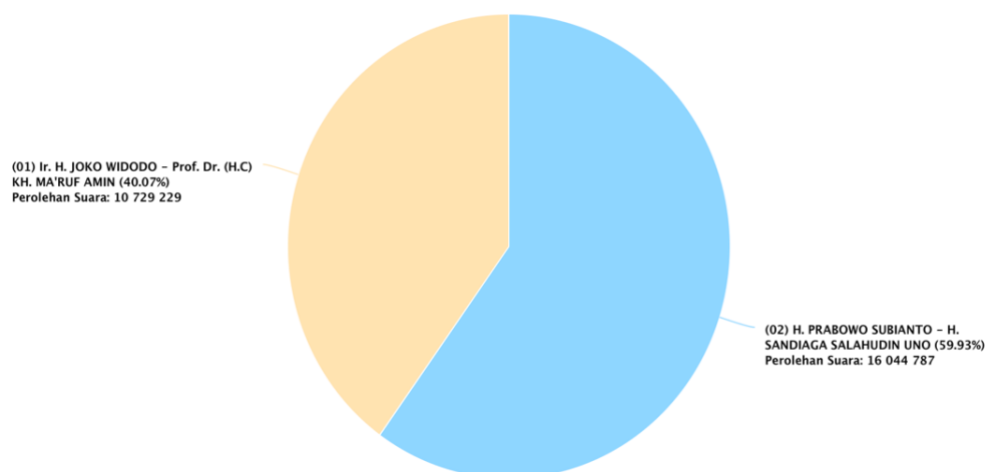
*Tabel 4. 1 Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Barat*

<b>Indikator IDI</b>	<b>IDI Menurut Indikator</b>
	2021
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara	96.61
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat	97.18
Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	97.18
Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	85.71
Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	95.95
Pemenuhan hak-hak pekerja	67.77
Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	82.66
Kesetaraan gender	93.13
Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	30.00
Anti monopoli sumber daya ekonomi	70.67
Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	76.29
Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	90.18
Akses masyarakat terhadap informasi publik	78.50
Kesetaraan dalam pelayanan dasar	71.94
Kinerja lembaga legislatif	100.00
Kinerja lembaga yudikatif	86.15
Netralitas penyelenggara pemilu	53.57
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	37.50
Jaminan pemerintah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	62.68
Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah	85.71
Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik	91.40
Pendidikan politik pada kader partai politik	100.00

Sumber : BPS 2022

## 4.2 Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Barat (2018-2020)

*Gambar 4. 1 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019*



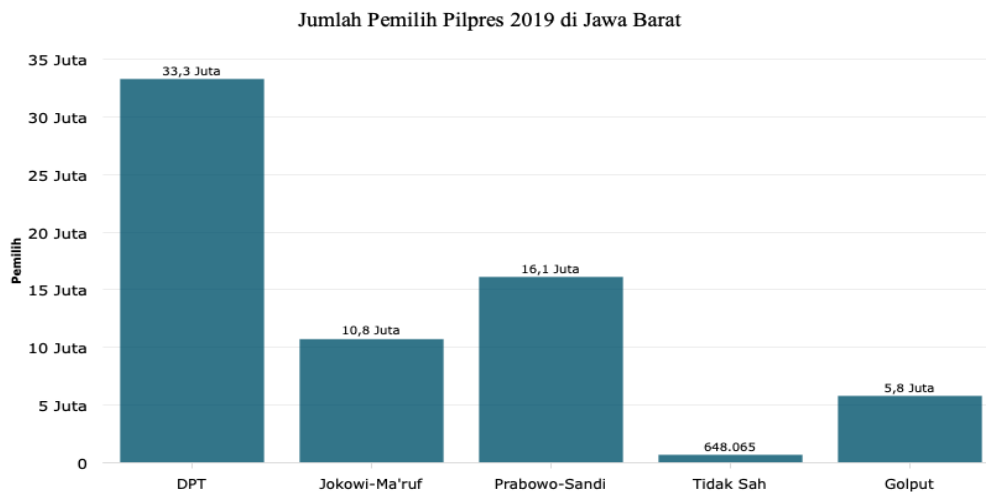
Sumber: KPU, 2019

Pada pemilihan presiden tahun 2019 yang terjadi di Jawa Barat, masyarakat yang berpartisipasi pada pemilu sangat tinggi. Dapat dilihat pada data di atas dari total pemilih Berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat nasional jumlah pemilih di Provinsi Jawa Barat yang menggunakan hak pilihnya mencapai 27,48 juta. Ini dapat dilihat dari suara sah pada Pilpres 2019 sebanyak 26,82 juta dan tidak sah 648 ribu.

Artinya angka partisipasi masyarakat di Jawa Barat pada Pilpres 2019 mencapai 82,58% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 33,27 juta jiwa. Sementara masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) hanya 5,79 juta jiwa atau 17,42% dari total DPT



**Gambar 4. 2 Jumlah Pemilih Pilpres 2019 di Jawa Barat**

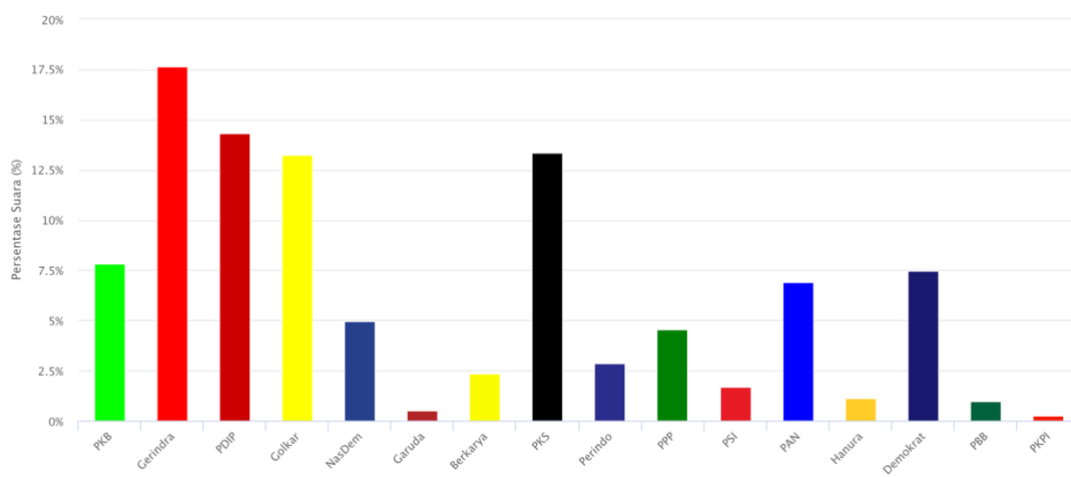


Sumber: Katadata, 2019

Sementara untuk suara sah terdiri atas pemilih yang memilih nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf sebanyak 10,75 juta (40,07%) suara dan yang memilih nomor urut 02 Prabowo-Sandi mencapai 16,08 (59,93%) suara. Jadi, Prabowo unggul dengan selisih 5,3 juta (19,86%) suara dari Jokowi

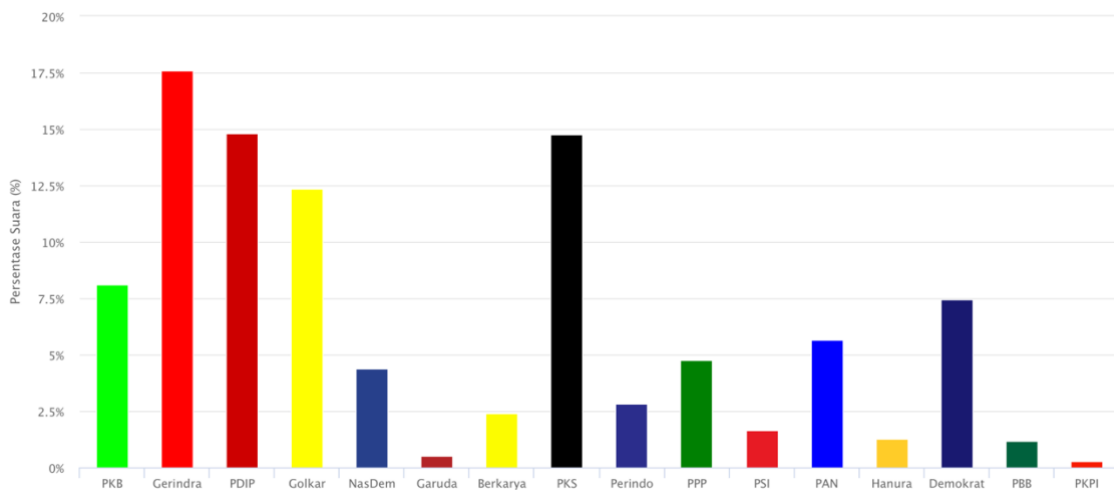
## 2. Pemilihan Legislatif 2019 di Jawa Barat

*Grafik 4. 1 Suara Legislatif DPR RI di Jawa Barat Tahun 2019*



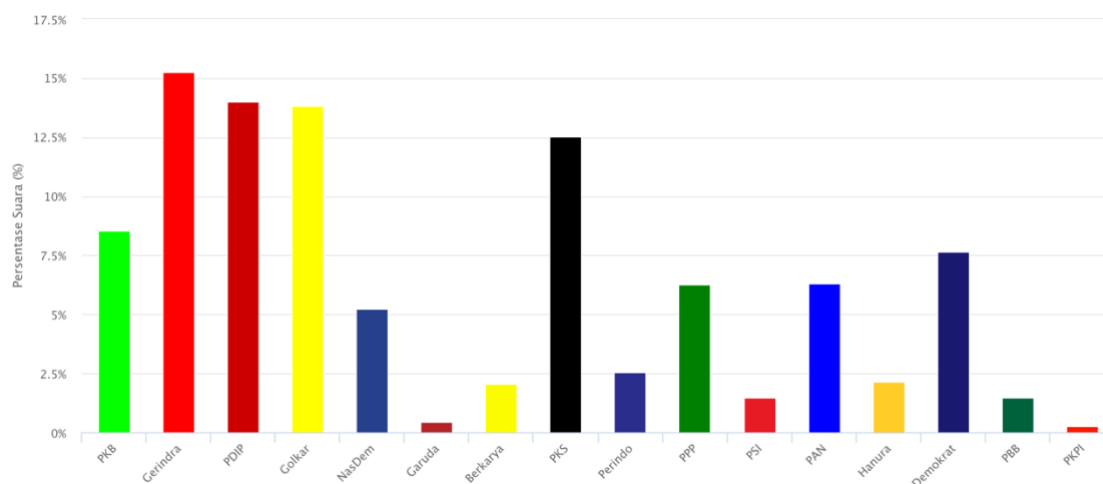
Sumber: KPU 2019

*Grafik 4. 2 Suara Legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019*



Sumber: KPU 2019

**Grafik 4. 3 Suara Legislatif DPRD Kab/Kota Jawa Barat Tahun 2019**



Sumber: KPU 2019

### 3. Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat Tahun 2020

**Tabel 4. 2 Tabel Partisipasi Pemilih Pilkada Jawa Barat Tahun 2020**

No	Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan	Data Pemilihan 2015	Target Partisipasi Pemilihan 2020 (%)	Data Partisipasi Pemilihan 2020	Keterangan (Gap dibanding 2015)
1	Kabupaten Bandung	62,90%	77,50 %	72,18%	↑ 9,28%
2	Kabupaten Cianjur	56,62%	77,50 %	67,24%	↑ 10,62%
3	Kota Depok	56,10%	77,50 %	62,80%	↑ 6,65%
4	Kabupaten Indramayu	58,95%	77,50 %	66,19%	↑ 7,24%
5	Kabupaten Karawang	66,40%	77,50 %	70,03%	↑ 3,63%
6	Kabupaten Pangandaran	77,94%	77,50 %	83,88%	↑ 5,94%
7	Kabupaten Sukabumi	58,92%	77,50 %	60,51%	↑ 1,59%
8	Kabupaten Tasikmalaya	60,13%	77,50 %	73,17%	↑ 13,04%
	Rata-Rata	62,25%	77,50 %	69,50%	↑ 7,25%

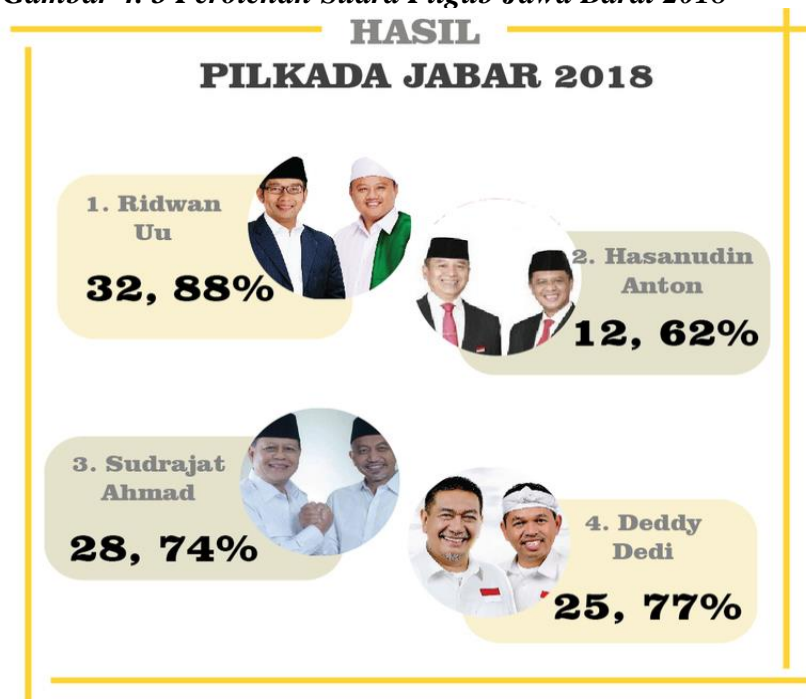
Sumber: KPU Jawa Barat 2021

Pilkada serentak tahun 2020 di Indonesia mengalami kenaikan angka partisipasi pemilih dari yang semula 69,06% pada Pilkada 2015, angka partisipasi memilih naik menjadi 76,09% pada Pilkada 2020. Di Jawa Barat sendiri, rata-rata kenaikan angka partisipasi pemilih di delapan kabupaten dan kota yang menggelar Pilkada Serentak 2020 bahkan lebih tinggi dari pada angka kenaikan partisipasi pemilih secara nasional. Hal ini terlihat berdasarkan data yang dihimpun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat.

Peningkatan partisipasi pemilih tertinggi dicatat oleh Kabupaten Tasikmalaya dengan partisipasi sekitar 73,17% pada tahun 2020 atau naik sebanyak 13,04% jika dibandingkan pada Pilkada 2015 yang mencatat partisipasi pemilih sebanyak 60,33%. Sedangkan kenaikan terendah dicatat oleh Kabupaten Sukabumi sekitar 1,59%. Dengan rincian, pada Pilkada 2015 sebanyak 58,92% naik menjadi 61,51% pada Pilkada tahun ini. Sementara itu, untuk untuk rata-rata partisipasi pemilih di delapan daerah tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat mencatat adanya kenaikan sebesar 7,25%.

#### 4. Pemilihan Gubernur di Jawa Barat Tahun 2018

*Gambar 4. 3 Perolehan Suara Pilgub Jawa Barat 2018*



Sumber: Diskominfo Jabar 2018

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum atau Rindu, meraih 32,88 persen (7.226.254 suara) pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tanggal 27 Juni 2018. Pada posisi kedua, Pasangan Hasanudin-Anton Charliyan atau Hasanah meraih 12,62 persen (2.773.078 suara), pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu meraih 28,74 persen (6.317.465 suara), dan pasangan Dedy-Dedi meraih 25,77 persen (5.663.198 suara), Hitungan tersebut berasal dari 21.979.995 suara sah atau 96 persen dari total keseluruhan. Data tersebut merupakan hasil rekapitulasi suara Pilgub pada Rapat Pleno Terbuka KPU Jabar.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 serta pilkada di 16 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat, partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2018

di Jawa Barat meningkat jadi 71 persen. Untuk Jawa Barat dari 63 persen pada 2013, sekarang 71 persen di 2018.

**Gambar 4. 4 Sebaran Suara Pilgub Jawa Barat 2018**

Kabupaten/Kota	Rindu	Hasanah	Asyik	Dua DM
Bandung	743.156	146.913	458.633	435.221
Kuningan	180.231	90.510	168.892	131.732
Majalengka	186.892	211.252	166.873	149.881
Pangandaran	75.500	83.478	35.659	49.292
Purwakarta	120.887	33.206	132.417	210.746
Subang	217.827	103.300	117.844	346.216
Sukabumi	296.823	108.172	395.318	318.244
Sumedang	253.744	82.862	134.274	178.590
Tasikmalaya	363.470	99.230	257.762	193.059
Bogor	528.479	319.189	801.322	590.882
Ciamis	251.287	127.438	179.232	133.157
Cianjur	338.346	101.525	263.464	326.547
Cirebon	306.712	204.861	199.877	289.093
Garut	435.652	180.852	249.580	337.391

Kabupaten/Kota	Rindu	Hasanah	Asyik	Dua DM
Indramayu	309.230	114.279	121.757	205.788
Karawang	227.146	124.481	279.176	407.526
Kota Bandung	656.090	111.190	359.267	153.323
Kota Banjar	37.766	15.541	21.407	35.883
Kota Bekasi	353.556	103.757	376.447	195.937
Kota Bogor	164.95	47.947	173.955	110.337
Kota Cimahi	135.268	21.132	91.044	41.681
Kota Cirebon	56.676	24.449	41.119	38.315
Kota Depok	246.992	69.751	358.129	135.068
Kota Sukabumi	53.749	20.579	59.410	32.889
Kota Tasikmalaya	104.402	35.773	164.720	73.502
Bandung Barat	350.243	90.774	220.790	210.674
Bekasi	231.176	100.637	489.097	332.224

Sumber: Kompas 2018

## 4.2 Sosial Ekonomi Status Masyarakat Jawa Barat

### 4.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat tahun 2021 mencapai 72,45, meningkat 0,36 poin (0,50 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (72,09). Pada tahun 2021, dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 0,82 persen menjadi Rp. 10,934 juta per tahun, dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut:

**Tabel 4. 3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat**

Wilayah Jawa Barat	Indeks Pembangunan Manusia		
	2019	2020	2021
Provinsi Jawa Barat	72.03	72.09	72.45
Bogor	70.65	70.40	70.60
Sukabumi	66.87	66.88	67.07
Cianjur	65.38	65.36	65.56
Bandung	72.41	72.39	72.73
Garut	66.22	66.12	66.45
Tasikmalaya	65.64	65.67	65.90
Ciamis	70.39	70.49	70.93
Kuningan	69.12	69.38	69.71
Cirebon	68.69	68.75	69.12
Majalengka	67.52	67.59	67.81
Sumedang	71.46	71.64	71.80
Indramayu	66.97	67.29	67.64
Subang	68.69	68.95	69.13
Purwakarta	70.67	70.82	70.98
Karawang	70.86	70.66	70.94
Bekasi	73.99	74.07	74.45
Bandung Barat	68.27	68.08	68.29
Pangandaran	68.21	68.06	68.28
Kota Bogor	76.23	76.11	76.59
Kota Sukabumi	74.31	74.21	74.60
Kota Bandung	81.62	81.51	81.96
Kota Cirebon	74.92	74.89	75.25
Kota Bekasi	81.59	81.50	81.95
Kota Depok	80.82	80.97	81.37
Kota Cimahi	78.11	77.83	78.06
Kota Tasikmalaya	72.84	73.04	73.31
Kota Banjar	71.75	71.70	71.92

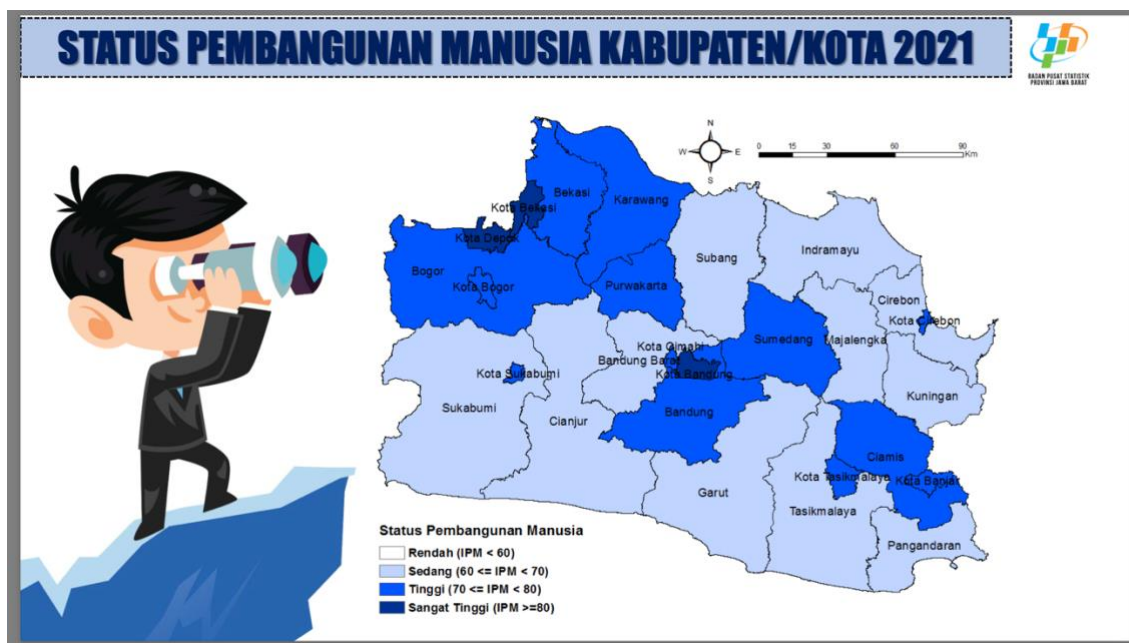
Sumber: BPS Jawa Barat 2021

Gambar 4. 5 Sebaran IPM tertinggi-Terendah di Jawa Barat



Sumber: BPS Jawa Barat 2021

Gambar 4. 6 Sebaran Status IPM di Jawa Barat



Sumber: BPS Jawa Barat 2021

Pada tahun 2021 capaian IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 72,45 berada pada status tinggi. IPM Provinsi Jawa Barat meningkat 6,30 selama kurun waktu 11 tahun



dibanding capaian pada tahun 2010. Dengan demikian IPM Provinsi Jawa Barat rata-rata tumbuh sebesar 0,83 persen per tahun.

#### **4.2.2 Pendidikan**

Pada tahun 2021, rata-rata anak usia 7 tahun yang mengenyam jenjang pendidikan memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,61 tahun atau hampir setara dengan menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,50 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun, dari 8,55 tahun menjadi 8,61 tahun atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang kelas IX.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu berapapun usianya. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Secara umum nilai APM akan lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau lebih cepat bersekolah.

**Tabel 4. 4 Indeks Pendidikan Jawa Barat 2019 – 2021**

No	Nama Daerah	Indeks Pendidikan		
		2019	2020	2021
1	Bogor	62.27	62.33	62.39
2	Sukabumi	57.34	57.54	57.67
3	Cianjur	56.51	57.24	57.30
4	Bandung	64.52	65.12	65.51
5	Garut	57.87	58.15	58.52
6	Tasikmalaya	58.68	59.31	59.77
7	Ciamis	63.94	64.72	65.78
8	Kuningan	58.21	59.18	59.97
9	Cirebon	56.37	57.09	57.75
10	Majalengka	57.55	58.18	58.34
11	Sumedang	63.57	64.39	64.46
12	Indramayu	53.97	55.03	55.79
13	Subang	55.31	56.17	56.23
14	Purwakarta	60.01	60.61	60.67
15	Karawang	59.06	59.48	59.54
16	Bekasi	65.80	66.76	67.39
17	Bandung Barat	60.21	60.27	60.33
18	Pangandaran	59.07	59.33	59.72
19	Kota Bogor	71.62	71.68	72.38
20	Kota Sukabumi	69.32	69.38	70.42
21	Kota Bandung	75.22	75.28	76.11
22	Kota Cirebon	69.42	69.48	70.21
23	Kota Bekasi	75.86	76.09	76.87
24	Kota Depok	75.31	76.27	76.89
25	Kota Cimahi	74.81	74.87	75.29
26	Kota Tasikmalaya	67.77	68.46	69.12
27	Kota Banjar	65.46	65.52	66.01

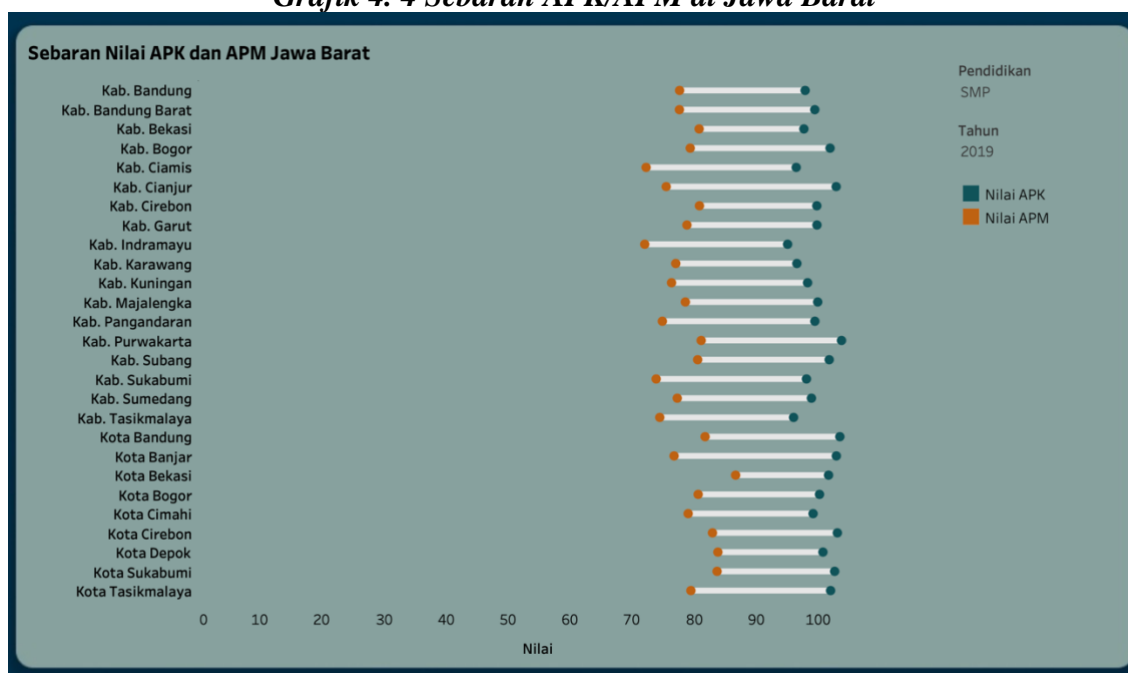
Sumber : BPS Jawa Barat

Indeks pendidikan dapat menjadi Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM.

Sedangkan APK definisikan sebagai Proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. APM dapat di definisikan sebagai Proporsi penduduk pada

kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

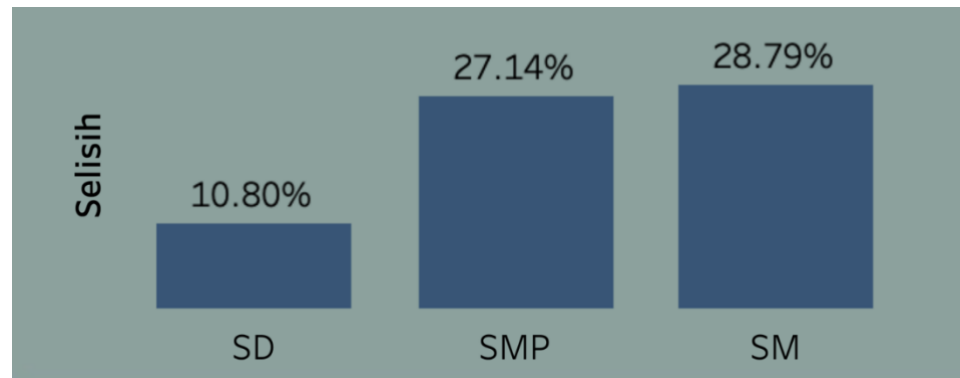
**Grafik 4. 4 Sebaran APK/APM di Jawa Barat**



Sumber: BPS 2021

Rata-rata selisih nilai APK dan APM di 27 Kabupaten Kota Jawa Barat Tahun 2019 mengindikasikan bahwa jenjang pendidikan SD terdapat selisih 10.80%, SMP 27.14% dan SM 28.79% anak usia sekolah yang terlambat atau lebih cepat bersekolah.

*Grafik 4. 5 Selisih APK/APM di Jawa Barat*



Sumber: BPS Jawa Barat 2021

## **BAB 5**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **5.1 Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Barat**

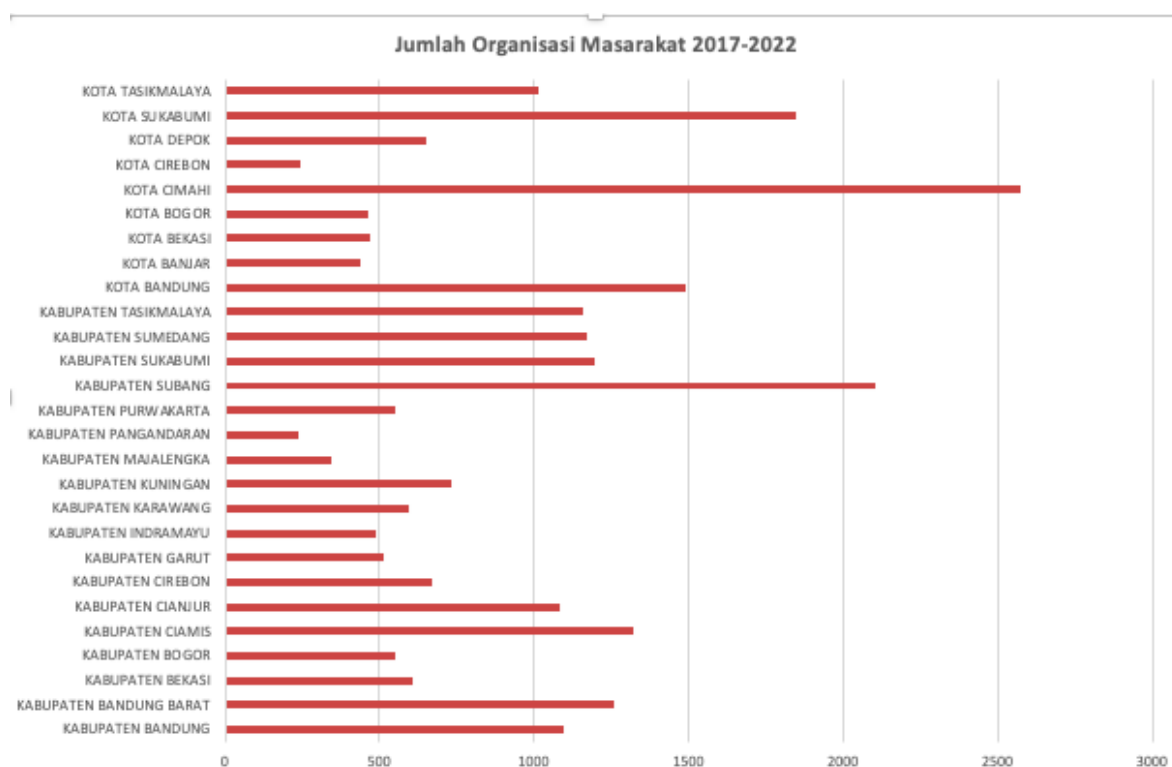
Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan karakteristik demografis Jawa Barat, yang terbagi kedalam 3 kategori, yaitu, Masyarakat Perkotaan/urban (Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Cirebon, kabupaten Bekasi); Masyarakat Transisi/sub-urban (Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor); dan Masyarakat Pedesaan/rural (Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, Kabupaten Sukabumi), dengan juga melihat dari 2 kontestasi terakhir yang dilakukan atau dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat yakni pemilihan gubernur pada tahun 2018 dan pemilihan presiden 2019 dan Pilkada 2020.

Dilihat dari data Indeks Demokrasi di Jawa Barat dari beberapa indikator tentunya ada beberapa permasalahan atau indikator yang dianggap memiliki penilaian relatif rendah dibandingkan dengan indikator lainnya. Pertama adalah indikator Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan dimana indeksnya hanya 30.00 yang berarti bahwa kurangnya peran masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam keinginannya berpartisipasi memengaruhi kebijakan publik yang tentunya ini menjadi salah satu permasalahan yang harus diselesaikan dalam upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat Jawa barat. Kedua adalah indikator Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah dengan indeks sebesar 37.50 tentunya juga hal ini menjadi bagian penting dalam mendorong partisipasi politik masyarakat Jawa Barat.

Banyak hal yang hari ini menjadi faktor pendorong partisipasi politik masyarakat bagaimana masyarakat mampu berpartisipasi dalam mengawal kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah juga bagaimana masyarakat memberikan pandangan dan keputusannya dalam menentukan pemimpin di daerah ataupun nasional dan juga perwakilannya dalam sebuah kontestasi atau pemilihan, salah satunya adalah melalui kegiatan organisasi masyarakat dimana organisasi masyarakat ini menjadi salah satu corong masyarakat dalam upaya terlibat dan berpartisipasi dalam politik.

**Grafik 5. 1 Jumlah Organisasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa Barat 2017-2022**

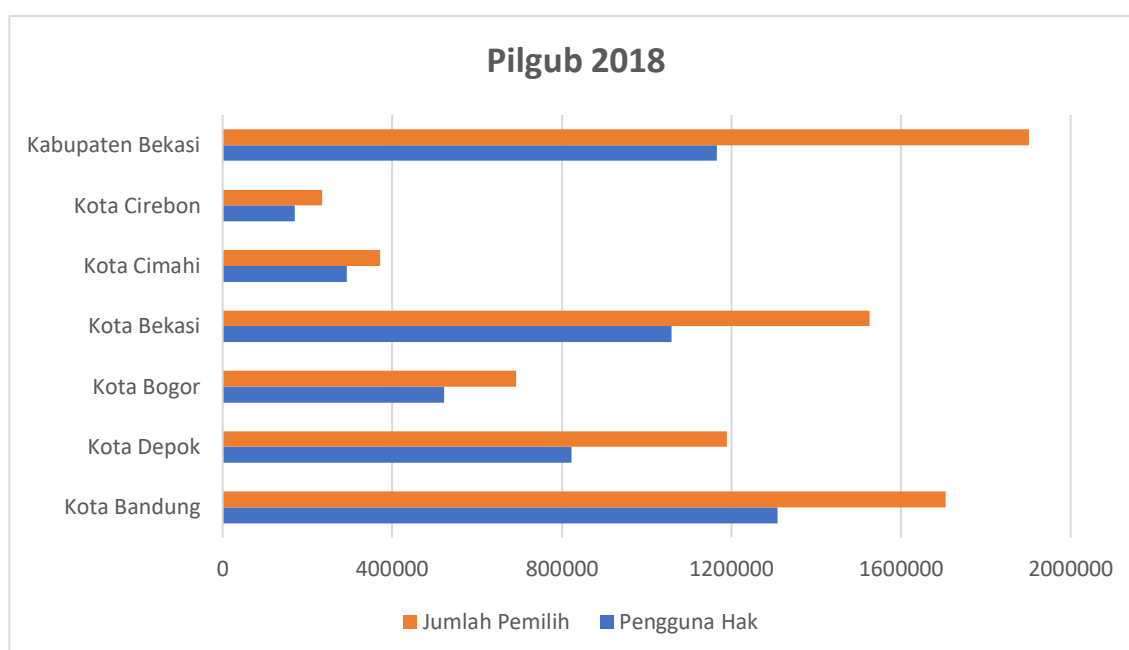


Sumber : diolah peneliti

## 5.2. Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Barat Wilayah Urban

Masyarakat Perkotaan/urban yang diwakili (Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Cirebon, kabupaten Bekasi) memiliki jumlah penduduk yang beragam yang tentunya sebanding dengan jumlah pemilih atau orang yang memiliki hak dalam berpartisipasi dalam perhelatan kontestasi baik itu Pilgub, Pemilu dan juga Pilkada namun tentunya juga partisipasi politik ini dapat dilihat dari jumlah pemilik hak yang menggunakan hak pilihnya dalam setiap pehelatan pesta demokrasi atau kontestasi

**Grafik 5. 2 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilgub Jabar 2018 Urban**

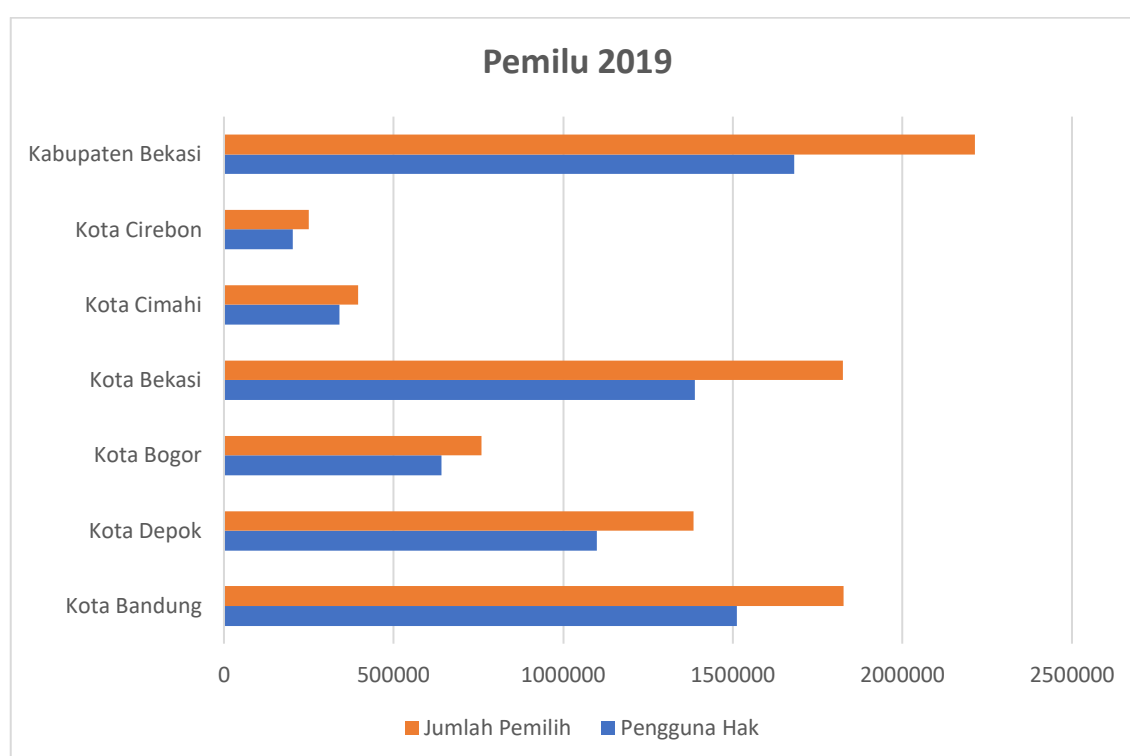


Sumber : diolah oleh peneliti

Dilihat dari grafik diatas pada pemilihan Gubernur pada tahun 2018 Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur terendah jika dilihat dari pesentase masayarakat yang menggunakan hak pilihnya dengan pengguna hak pilih yang hanya mencapai 1.165.191 orang dimana jumlah pemilih terdaftarnya mencapai 1.901.907 orang atau ada 39% pemilik hak pilih yang tidak

menggunakan hak pilihnya. Daerah dengan partipasi memilih dalam Pilgub 2018 yakni Kota Cimahi dengan jumlah yang menggunakan hak pilih 293.503 orang dari jumlah pemilik hak pilih sebanyak 370.752 orang atau hanya 21% masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilgub 2018 di Kota Cimahi.

**Grafik 5. 3 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilu 2019 Urban**



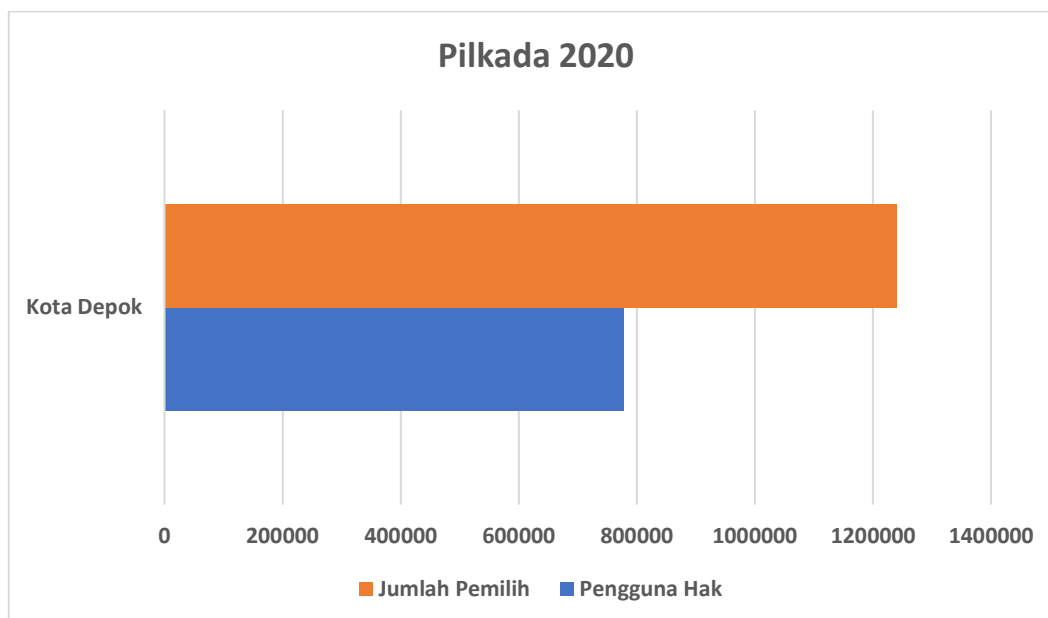
Sumber : Diolah Peneliti

Dilihat dari grafik diatas pada pemilu 2019 Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan selisih pengguna hak pilih dan pemilik hak pilih paling tinggi sebanyak 24% pemilik hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019, kemudian Kota Cimahi menjadi daerah dengan pengguna hak pilih tertinggi terhitung hanya 14% pemilik hak pilih yang tidak melakukan atau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019. Cukup menarik melihat hal ini jika kita lihat dimana Bekasi menjadi daerah yang dekat daerah pusat dan bahkan masuk kedalam bagian daerah megapolitan. Sehingga memang berkaitan dengan partisipasi politik ini tentunya selain sangat memang



dipengaruhi oleh beberapa aspek atau faktor, selain itu juga perilaku pemilih menjadi salah satu hal yang mempengaruhi partisipasi politik.

**Grafik 5. 4 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilkada 2020 Urban**



Sumber : Diolah Peneliti

Pada kategori masyarakat urban daerah yang melakukan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 adalah Kota Depok. Dilihat dari grafik diatas ada hal yang cukup menarik jika dilihat dimana Kota Depok yang dengan Kota DKI Jakarta dan dekat dengan pusat pemerintahan dan juga masuk kedalam kategori daerah megapolitan nyatanya partisipasi politiknya dalam Pilkada 2020 tidak begitu baik dimana ada sekitar 37% masyarakat yang memiliki hak pilih tidak memberikan suaranya atau menggunakan hak pilihnya

### **5.2.1 Analisis Partisipasi Politik Jawa Barat Kategori Urban**

Dalam beberapa kontestasi yang dilakukan di Jawa Barat daerah bisa dilihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada partisipasi politik masyarakat di daerah urban. Kabupaten Bekasi dalam beberapa kontestasi menjadi daerah dengan partisspasi dalam menggunakan pilihan dan juga terlibat dalam pemilihan baik itu Pemilihan Gubernur, Pemilihan Umum dan menjadi daerah dengan selisih pengguna hak pilih dan pemilik hak pilih yang cukup rendah ada sekitar 20% lebih dalam setiap kontestasi masyarakat Kabupaten Bekasi tidak ikut berpartisipasi.

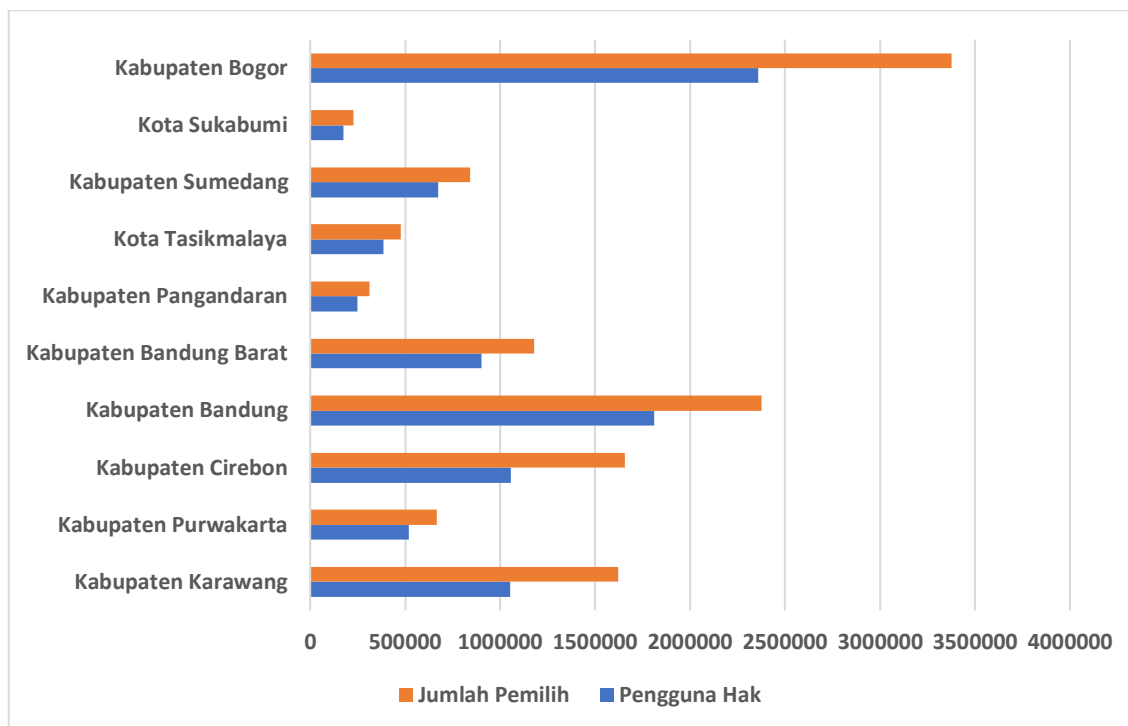
Dilihat dari beberapa faktor yang hari ini dianggap mempengaruhi partisipasi politik pertama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia Kabupaten Bekasi dan kota Depok secara Indeks Pembangunan Manusia atau IPM kabupaten Bekasi memiliki nilai IPM yang cukup tinggi yakni berkisar pada angka 74,45 nilai yang cukup baik dikarenakan masih banyak daerah di Jawa Barat yang secara nilai IP masih berada di bawah Nilai 70, dimana nilai ini tidak terpaau jauh dari Kota Cimahi yang mana Kota cimahi dalam kategori masyarakat urban menjadi daerah dengan partisipasi politik terutama dalam pemilihan menjadi kota atau daerah dengan partisipasi yang cukup baik yang memiliki nilai IPM sekitar 78 kemudian juga dilihat dari faktor pendidikan dimana melihat pada indeks pendidikan Kabupaten Bekasi tahun 2019-2021 nilai indeks pendidikannya berada pada nilai indeks sekitar 67 sehingga juga secara pendidikan indeks pendidikan Kabupaten Bekasi memiliki nilai yang cukup baik dan juga Kota cimahi sebagai kota dengan partisipasi tertinggi nilai indeks pendidikan sebesar 75

Hal yang cukup menarik jika dilihat dari jumlah organisasi masyarakat yang dimiliki oleh Kabupaten Bekasi dan Kota Cimahi dari tahun 2017 sampai 2021 Kabupaten Bekasi hanya memiliki sebanyak 607 organisasi masyarakat, Kota Depok 649 organisasi masyarakat dan Kota Cimahi memiliki jumlah organisasi masyarakat sebanyak 2537 organisasi masyarakat. Ini menjadi gambaran menarik melihat jumlah organisasi masyarakat yang terpaau cukup jauh tentunya ini berpengaruh pada partisipasi politik daerah tersebut dimana hari ini organisasi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur keterlibatan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam politik, dengan hadirnya organisasi masyarakat, masyarakat diberikan corong – corong untuk memberikan aspirasi dan ikut memberikan pengawasan juga masukan berkaitan dengan keputusan dan kebijakan pemerintah juga dalam menentukan dan memilih perwakilan dan juga pemimpinnya dalam konteks politik.

### **5.3. Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Barat Wilayah Sub-Urban**

Masyarakat dalam kategori Transisi/sub-urban diwakili oleh (Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kota Sukabumi, Kabupaten Bogor).

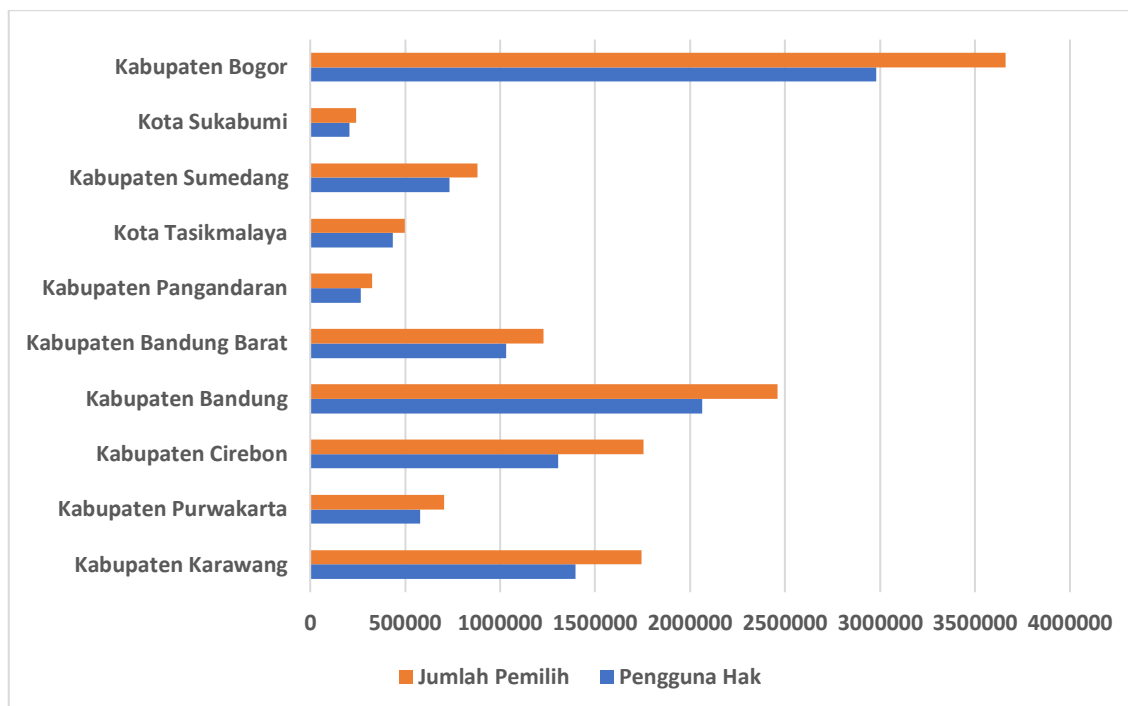
**Grafik 5.5 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilgub 2018 Sub-Urban**



Sumber : Diolah Peneliti

Dalam pemilihan Gubernur 2018 Kabupaten Cirebon menjadi daerah dengan selisih pemilik hak pilih dan pengguna hak pilih yang cukup besar 36% masyarakat Kota Cirebon tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur 2018, sedangkan daerah dengan selisih pengguna hak pilih dan pemilik hak pilih terkecil adalah Kabupaten Tasikmalaya hanya 19% masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang tidak menggunakan hak pilihnya. Daerah lain dalam kategori sub-urban rata-rata memiliki selisih 20% pengguna hak pilih dengan pemilik hak pilihnya.

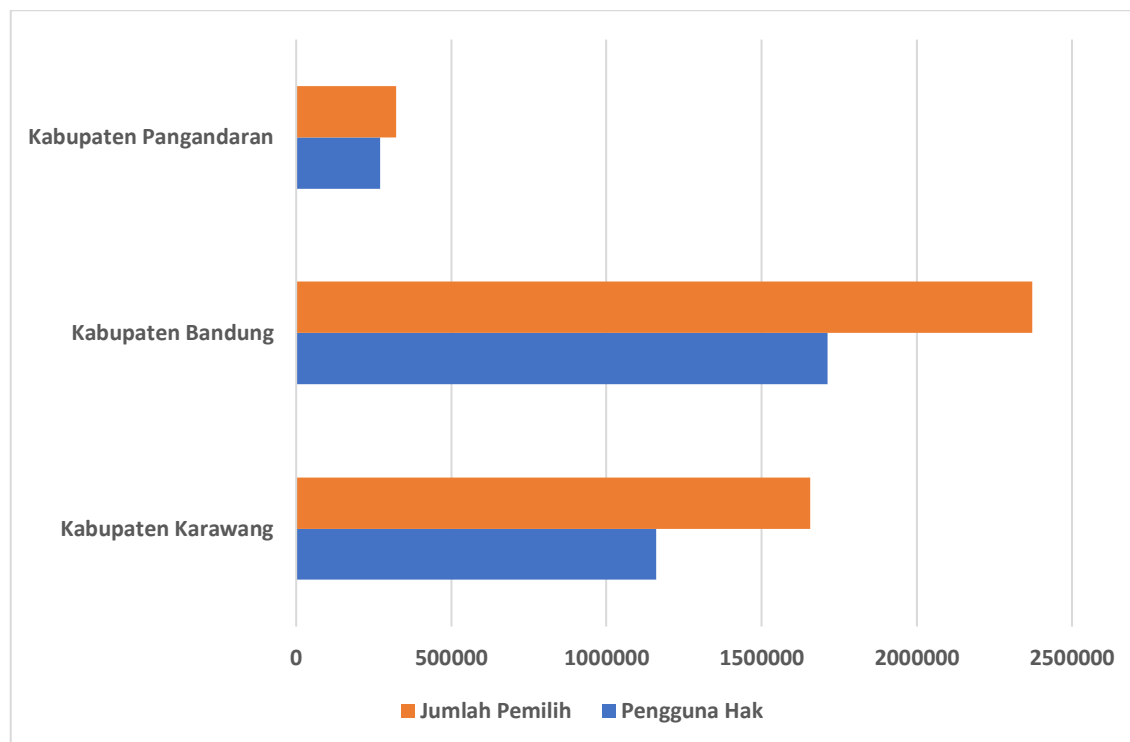
**Grafik 5.6 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilu 2019 Sub-urban**



Sumber : Diolah Peneliti

Dalam pemilu 2019 pun ada kesamaan berkaitan dengan daerah yang memiliki selisih pemilik dengan pengguna hak pilih pada kategori sub-urban, Kabupaten Cirebon menjadi daerah yang memiliki selisih pemilik dengan pengguna hak pilih yang cukup tinggi dibandingkan dengan daerah lain pada pemilu 2019 sekitar 26% masyarakat Kabupaten Cirebon tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019, begitupun dengan daerah dengan selisih pemilik dan pengguna hak pilih terendah pada pemilu 2019 Kabupaten Tasikmalaya menjadi daerah dengan selisih pemilik dan pengguna hak pilih terendah dengan hanya 13% pemilik hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi pemilu 2019 dengan rata – rata selisih pengguna dan pemilik hak pilih pada pemilu 2019 pada kategori daerah sub-urban yang berada pada persentase dibawah 20%

**Grafik 5.7 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilkada 2020 Sub-Urban**



Sumber : Diolah Peneliti

Pada pilkada 2020 kategori daerah sub-urban yang melakukan pemilihan kepala daerah terdapat 3 daerah yakni Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Karawang. Dimana Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan selisih pemilik dan pengguna hak pilih yang tertinggi sekitar 30% pemilik hak pilih tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada 2020, kemudian Kabupaten Pangandaran menjadi daerah dengan selisih pemilik dan pengguna hak pilih terendah hanya 16% pemilik hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, sedangkan Kabupaten Bandung selisih pemilik hak pilihnya mencapai 28% pemilik hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada 2020 tentunya ini menjadi juga catatan berkaitan dengan pilkada pada daerah sub-urban.

### 5.3.1 Analisis Partisipasi Politik Jawa Barat Kategori Sub-Urban

Pada Kategori daerah sub-urban Jawa Barat ada beberapa hal menarik berkaitan dengan partisipasi politik masyarakatnya terutama berkaitan dengan bagaimana masyarakat terlibat dan juga berpartisipasi dalam beberapa kontestasi pemilihan kepala daerah baik kota/kabupaten, gubernur, kemudian legislatif dan juga presiden dilihat dari pemilik hak pilih dengan pengguna hak pilihnya.

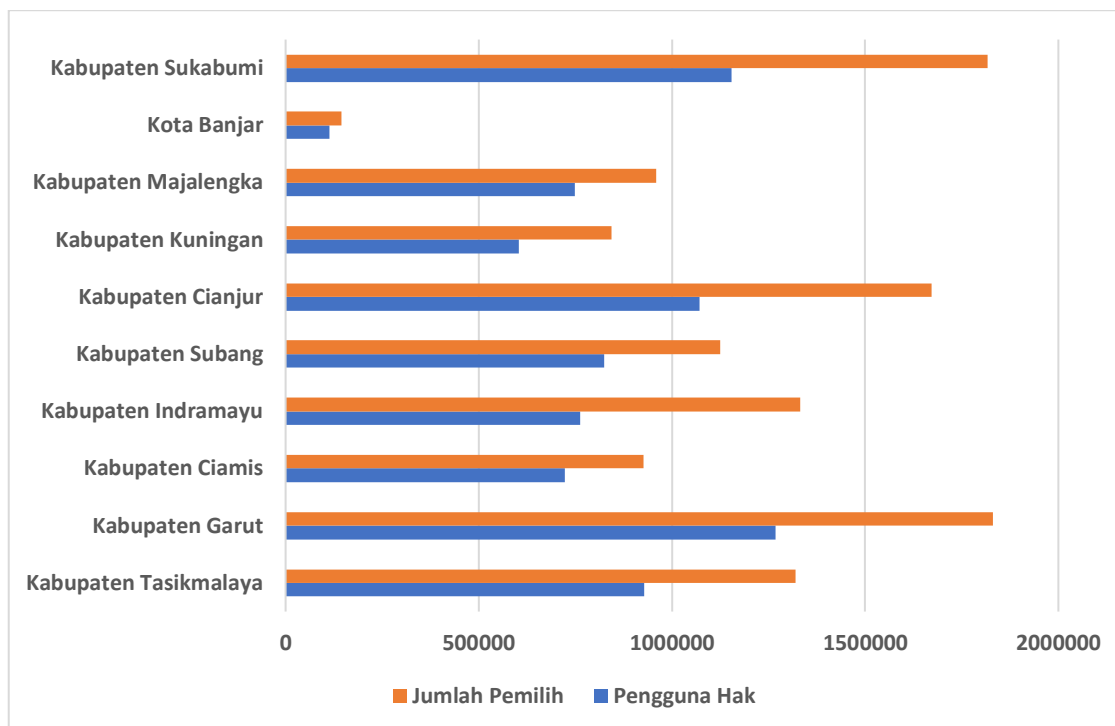
Dilihat dari 3 kontestasi yang terjadi partisipasi politik masyarakat di kategori sub-urban ada dua daerah dengan partisipasi politik terendah yakni Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Karawang. Secara Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Cirebon berada pada nilai 69,12 dan Kabupaten Karawang 70,94 dimana kedua daerah ini IPMnya berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Barat, Kedua dilihat dari Indeks Pendidikan Kabupaten Cirebon ada pada poin 57,7 dan Kabupaten Karawang pada 59,54 nilai indeks pendidikan ini tentunya menjadi nilai yang cukup rendah. Sedangkan untuk daerah dengan partisipasi yang tinggi Kabupaten Tasikmalaya secara IPM berada pada nilai 65,9 dan indeks pendidikan 59,77 sehingga jika hanya dilihat pada IPM dan Indeks Pendidikan tentunya tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi politik.

Pada aspek organisasi masyarakat kembali sedikit banyak berpengaruh pada partisipasi masyarakat terkhusus pada partisipasi politik, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Karawang dari tahun 2017 – 2021 terhitung hanya ada 671 untuk Kabupaten Cirebon dan 593 pada Kabupaten Karawang dan untuk Kabupaten Tasikmalaya hari ini dengan partisipasi politik yang terhitung tinggi dari 2017-2021 terhitung ada 1156 organisasi masyarakat yang terdaftar, sehingga kembali baik kategori urban ataupun sub-urban memiliki gambaran yang sama bahwa banyaknya organisasi masyarakat yang hari ini hadir di daerah tersebut memberikan ruang – ruang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik.

#### **5.4. Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Barat Wilayah Rural**

Masyarakat Pedesaan/rural yang diwakili daerah (Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kota Banjar, Kabupaten Sukabumi).

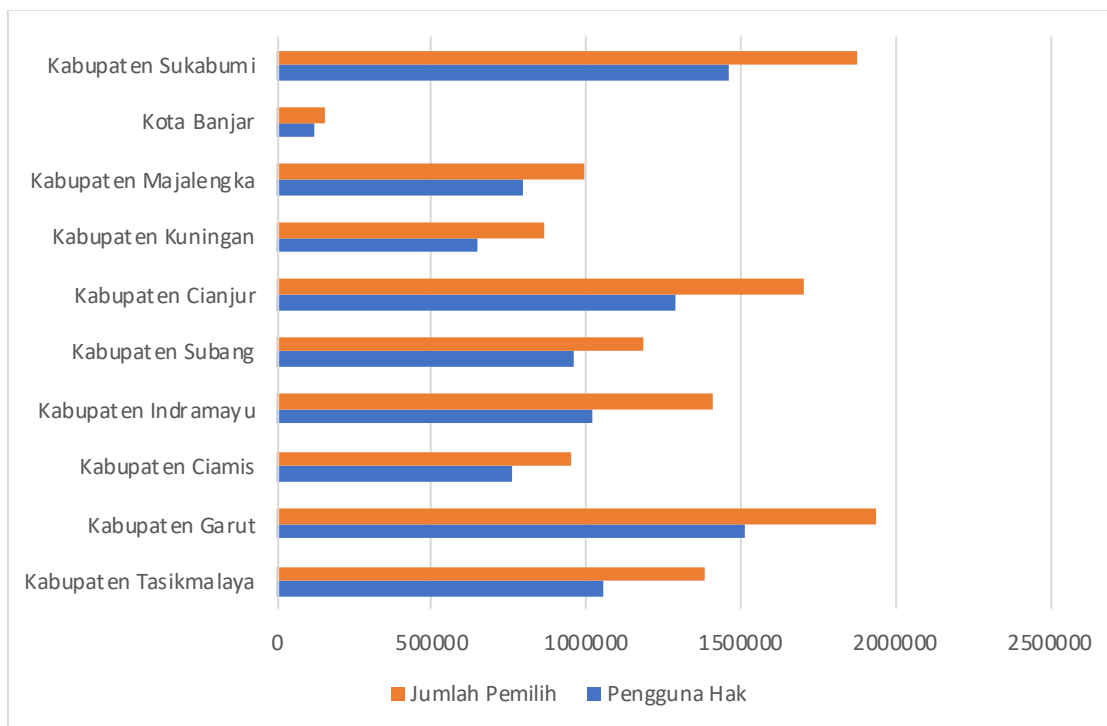
**Grafik 5.8 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilgub 2018 Rural**



Sumber : Diolah Peneliti

Dilihat dari pemilihan Gubernur 2018 pada kategori rural Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan partisipasi terendah dengan selisih pengguna hak pilih dan pemilik hak pilih sebesar 36%, dan untuk daerah dengan partisipasi tertinggi yakni daerah Kota Banjar dengan selisih antara pemilik hak pilih dengan pengguna hak pilih sebanyak 21% meskipun secara rata – rata memang untuk kategori rural selisih antara pengguna dan pemilik hak pilih berada pada persentase sekitar 20%.

**Grafik 5.9 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pemilu 2019 Rural**

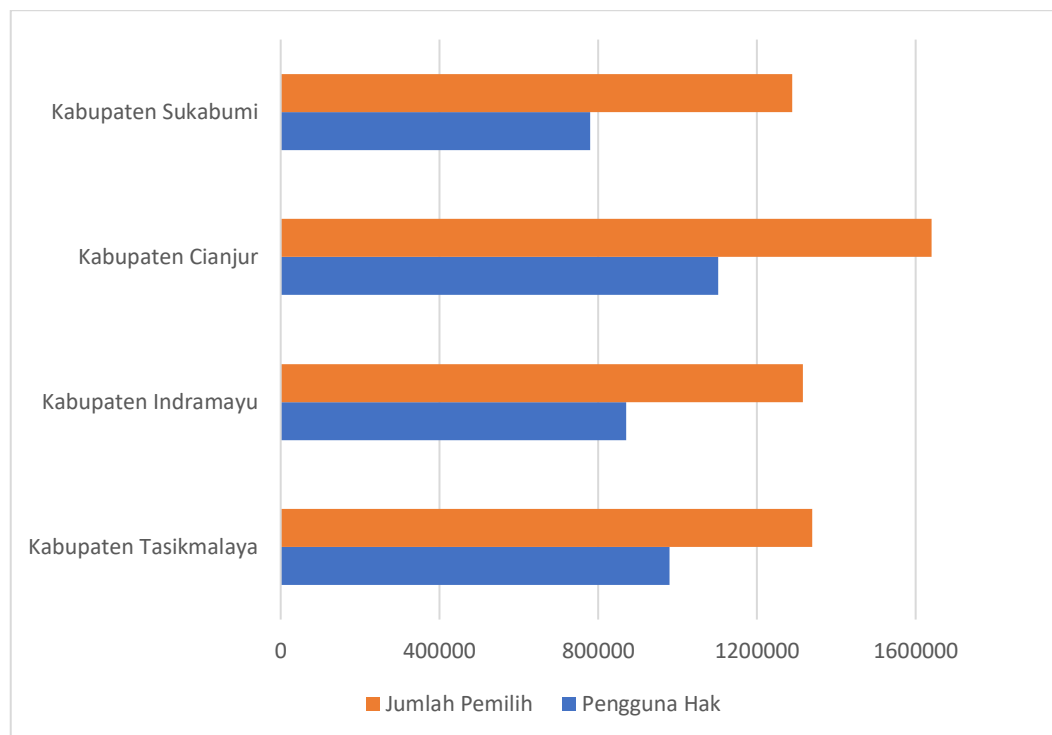


Sumber : Diolah Peneliti

Pada Pemilu 2019 untuk kategori daerah Rural partisipasi politik terendah terjadi pada daerah Kabupaten Kuningan selisih antara pemilik dan pengguna hak pilih berada pada persentase 25% sedangkan daerah dengan partisipasi tertinggi Kota Banjar dengan 19% selisih pemilik dan pengguna hak pada pemilu 2019.



**Grafik 5.10 Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Pilkada 2020 Rural**



Sumber : Diolah Peneliti

Pada Pilkada 2020 di kategori daerah rural Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan partisipasi terendah dengan selisih pemilik dan pengguna hak pilih mencapai 39% kemudian juga pada daerah kategori rural daerah dengan selisih pemilik dan pengguna hak pilih terendah atau dengan kata lain partisipasi tertinggi adalah Kabupaten Tasikmalaya dengan 27% selisih antara pemilik dan pengguna hak pilihnya pada pilkada yang dilakukan di Jawa Barat pada tahun 2020.

#### **5.4.1 Analisis Partisipasi Politik Jawa Barat Kategori Rural/Pedesaan**

Pada tiga kontestasi yang dilakukan di Jawa Barat Kabupaten Sukabumi menjadi daerah dengan selisih pengguna dan pemilik hak pilih terbesar pada Pilkada 2020 dan Pilgub 2018 kabupaten Sukabumi selisihnya mencapai angka 39% dan 36% yang artinya pada kontestasi Pilgub dan Pilkada 2020 partisipasi Kabupaten Sukabumi sangat rendah, kemudian hanya pada pemilu 2019 Kabupaten Kuningan menjadi daerah dengan

partisipasi terendah dengan selisih pengguna dan pemilik hak pilih mencapai 27%, kita coba lihat dari IPM Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi pada nilai 67,07 dan Kabupaten Kuningan pada nilai 69,71 yang tentunya berada di bawah IPM provinsi Jawa Barat. Kemudian dilihat pada Indeks pendidikan Kabupaten Sukabumi berada pada nilai 57,67 dan Kabupaten Kuningan pada 59,97.

Dilihat dari aspek organisasi masyarakat Kabupaten Sukabumi sebenarnya memiliki jumlah organisasi masyarakat yang cukup tinggi terhitung 1195 organisasi terdaftar dalam rentang waktu 2017-2021, kemudian untuk Kabupaten Kuningan jumlah organisasi masyarakat 732 organisasi masyarakat yang terdaftar sehingga pada kategori rural sebenarnya organisasi masyarakat tidak menjadi faktor yang signifikan untuk mampu mendorong partisipasi politik masyarakat. Justru IPM dan Indeks Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong partisipasi masyarakat.

## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berkaitan dengan partisipasi politik ada beberapa faktor yang hari ini menjadi pendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik yang hari ini terjadi di masyarakat dimana diantaranya adalah berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia yang dimana didalamnya tentunya berkaitan dengan kehidupan yang layak, kedua berkaitan dengan indeks pendidikan dan juga keberadaan organisasi masyarakat di daerah dalam mendorong partisipasi politik. Adapun kesimpulan dalam kajian ini yaitu :

1. Pertama adalah berkaitan dengan partisipasi politik sebenarnya daerah di Jawa Barat masih bisa terhitung cukup baik jika dilihat dari kontestasi Pilgub, Pilkada dan juga Pemilu rata-rata selisih pengguna dan pemilik hak pilih berada pada rentang 20-30%.
2. Kedua berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia untuk Kategori Urban dan Sub-urban tidak terlalu berpengaruh pada partisipasi politiknya suatu daerah, namun untuk kategori rural atau pedesaan tentunya IPM ini menjadi salah satu faktor yang hari ini mempengaruhi partisipasi politik.
3. Ketiga berkaitan dengan Indeks Pendidikan kembali pada kategori Urban dan Sub-urban berkaitan dengan indeks pendidikan tidak menjadi faktor pendorong penentu partisipasi politik masyarakat di daerah tersebut, namun untuk kategori rural indeks pendidikan menjadi satu hal yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

4. Keempat berkaitan dengan organisasi masyarakat pada kategori Urban dan Sub-urban jumlah organisasi masyarakat memberikan pengaruh cukup signifikan pada partisipasi politik masyarakat, hal berkebalikan pada kategori rural atau pedesaan dimana organisasi masyarakat tidak menjadi faktor penting dalam partisipasi masyarakat.
5. Kelima perbedaan jumlah penduduk di daerah menjadi juga faktor berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat di Jawa Barat.

## **6.2 Rekomendasi**

Berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat pemerintah hari ini tentunya terutama provinsi Jawa Barat sebagai salah satu daerah dengan jumlah penduduk tertinggi Indonesia perlu melakukan atau memberikan intervensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik.

1. Perlu adanya pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan kegiatan politik
2. Perlu adanya intervensi yang tepat sasaran untuk sektor ekonomi terutama di daerah kategori rural dimana faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada partisipasi politik masyarakat.
3. Perlu adanya intervensi untuk meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat Jawa Barat dikarenakan ada sekitar selisih 20-30% pemilik hak pilih dengan pengguna hak pilih yang artinya ada 20-30% masyarakat yang belum berpartisipasi dalam kegiatan politik masyarakat.

4. Adanya organisasi masyarakat perlu dijadikan sebagai salah satu partnet kolaborasi pemerintah dalam meningkat partisipasi masyarakat dalam kegitan politik di masyarakat.
5. Perlu adanya intervensi yang tepat terutama pada daerah – daerah yang hari ini partisipasi politik atau keterlibatannya dalam setiap kontestasi yang dianggap belum maksimal atau terhitung rendah.
6. Daerah Sub-urban dan Rural memiliki daerah yang memiliki daerah dengan partisipasi politik yang cenderung rendah dibandingkan dengan kategori Urban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tangkilisan, H. N. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Prawirosentono, S. (1999). *Manajemen sumberdaya manusia "kebijakan kinerja karyawan" : kiat membangun organisasi kompetitif menjelang perdagangan bebas dunia* . Yogyakarta: BPFE.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Robbins, S. P. (1996). *Organizational Behavior ( Terjemahan ) Jilid 2, Edisi Ketujuh*. Jakarta : PT. Prenhallindo.
- Brotoharsojo, H., & Wungu, J. (2003). *ingkatkan Kinerja Perusahaan dengan Merit System*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Marbun, B. N. (2005). *Otonomi daerah 1945-2005 proses dan realita: perkembangan otda, sejak zaman kolonial sampai saat ini*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Soejito, I. (1990). *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriatna, T. (1996). *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Bumi Aksara .
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Widjaja, H. (2007). *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kaho, J. R. (2007). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Bratakusumah, & Solihin. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yani, A. (2004). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Dunn, W. N. (1993). *Kebijakan Publik dan Pengambilan Keputusan*. Yogyakarta.

- Riant, N., & Dwijowijoto. (2014). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sumbulah, U. (2006). AGAMA, KEKERASAN DAN PERLAWANAN IDEOLOGIS. *ISLAMICA*, 1-11.
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-11.
- Sirajuddin, I. A. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makasar. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-14.

## SURAT KETERANGAN TUGAS:

	<p>PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT</p> <p><b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b></p> <p>Jalan Supratman No. 44 Telepon : (022) 7206174-7205759 Faksimili : (022) 7106286          Website : bakesbangpol.jabarprov.go.id Email : bakesbangpol@jabarprov.go.id          Bandung 40121</p>
	<p><b>SURAT KETERANGAN</b></p> <p>Nomor: 122/KPG.03.01.01/KESBAK</p>
<p>Yang bertandatangan di bawah ini:</p>	
Nama	: Dr. Drs.H.R.IIP HIDAJAT, M.Pd.
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Utama Muda, / IV/c
Jabatan	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat
N I P	: 196412151902031005
Alamat	: Jalan Supratman No. 44 Bandung
<p>Dengan ini menerangkan bahwa:</p>	
Nama	: Leo Agustino, Ph.D
Jabatan	: Ketua Tim
Anggota	: Firman Manan, M.A Idil Akbar, M.IP
<p>Telah selesai menyusun Kajian dalam Ketahanan Ekonomi di Jawa Barat tahun 2022 sebagai preferensi pantauan kondisi dan situasi Politik dan Kerukunan Umat Beragama pada Masa Pandemi Covid-19 dengan Judul "Kajian Polarisasi dan Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Jawa Barat" dan "Analisa Partisipasi Politik Masyarakat di Jawa Barat Tahun 2022".</p> <p>Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Bandung, 03 Februari 2021</p>	
<p>KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA BARAT</p>	
	
<p>Dr. Drs. H. R. IIP HIDAJAT, M.Pd. Pembina Utama Muda NIP. 19641215 199203 1 005</p>	